

*Dwi
Bahasa
Indonesia
Inggris*



www.kemhan.go.id
www.dmc.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

WIRA



RAPIM KEMHAN TA. 2015

STRATEGI PERANG SUN TZU: PERSPEKTIF INDONESIA

THE ESSENCE OF NATIONAL SECURITY STRATEGY

ENERGY RESERVE FOR NATIONAL DEFENSE

ISSN 1693-0231



9 771693 023126





Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Di penghujung tahun 2014 ini, tim redaksi kembali menyapa para pembaca dengan edisi terbaru WIRA November-Desember 2014. Dalam edisi ini, tim redaksi mengangkat tema yang berkaitan dengan Strategi Pertahanan Negara. Dalam laporan utama dibahas tentang Rapim Kemhan sebagai sarana komunikasi dalam rangka untuk menyampaikan refleksi tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015 di jajaran Kemhan dan TNI.

Kami sajikan juga artikel tentang Strategi Perang Sun Tzu Perspektif Indonesia dan beberapa tulisan diantaranya, Esensi Strategi Keamanan Nasional, Tingkat Kedamaian Dunia, serta rubrik-rubrik opini yang akan memperkaya wawasan pengetahuan para pembaca sekalian.

Para Pembaca WIRA yang kami banggakan,

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran. Redaksi Wira berhak mengedit tulisan/artikel yang dikirim tanpa mengubah substansi berita. Tulisan/artikel dapat dikirimkan melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Bagi yang berminat mendapatkan majalah WIRA dapat menghubungi tim redaksi di nomor telepon. 021-3828651. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di halaman www.dmc.kemhan.go.id.

Semoga majalah WIRA edisi Nopember-Desember 2014 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Editorial

Dear kind readers,

Towards the end of 2014, our newsroom team warmly greets you with the latest edition of WIRA November–December 2014. In this edition, we have a theme related to the National Defense Strategy. In the main report, we discuss the High Official Meeting of the Ministry of Defense as a communication means to submit a reflection of 2014 and a projection of 2015 at the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces.

We also present an article on Sun Tzu's War Strategy from Indonesia's Perspective and several other articles, including the Essence of the National Security Strategy, the Global Peace Index, and opinions to enrich your insight.

WIRA readers whom we are proud of,

To enrich the articles of WIRA Magazine, we always expect your participation by sending articles, opinions, information, responses or critics and recommendations. WIRA newsroom is entitled to edit the articles without changing the substance what so ever. Articles can be sent by email to redaksi.wira@kemhan.go.id. Those interested in getting WIRA magazine, can contact the newsroom at the number 021-3828651. WIRA Magazine can also be accessed by online at www.dmc.kemhan.go.id.

May WIRA Magazine of November–December 2014 edition bring advantages for all of us.

DAFTAR ISI/CONTENTS

LAPORAN UTAMA

- 5 RAPIM KEMHAN TA.2015
HIGH OFFICIAL MEETING OF THE MINISTRY OF DEFENSE 2015
-

STRATEGI PERTAHANAN

- 10 STRATEGI PERANG SUN TZU: PERSPEKTIF INDONESIA
SUN TZU'S WAR STRATEGY: INDONESIA'S PERSPECTIVE
- 20 ESENSI STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
THE ESSENCE OF NATIONAL SECURITY STRATEGY
-

INFO PERTAHANAN

- 30 TINGKAT KEDAMAIAAN DUNIA
GLOBAL PEACE INDEX
- 37 "WORLD DEFENCE TECHNOLOGY IMPROVEMENT" INDO DEFENCE 2014 EXPO & FORUM
"WORLD DEFENCE TECHNOLOGY IMPROVEMENT" INDO DEFENCE 2014 EXPO & FORUM
-

OPINI PERTAHANAN

- 35 GAGASAN POROS MARITIM BAGUS, NAMUN BAGAIMANA DENGAN NASIB 'URBAN PESISIR' KITA?
MARITIME AXIS IDEA IS GOOD, YET HOW ABOUT OUR 'MARITIME URBAN'?
- 41 PENGARUH GLOBALISASI DAN DINAMIKA KONDISI KEAMANAN KAWASAN ASEAN PADA
SISTEM PERTAHANAN NKRI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN
GLOBALIZATION IMPACT AND THE DYNAMICS OF SECURITY CONDITION IN ASEAN REGION
IN THE DEFENSE SYSTEM OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN
THE DEFENSE ECONOMIC PERSPECTIVE
- 46 CADANGAN ENERGI UNTUK PERTAHANAN NEGARA
ENERGY RESERVE FOR NATIONAL DEFENSE
- 56 BERITA FOTO

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat: Menteri Pertahanan/Sekjen Kemhan, **Pemimpin Umum:** Kapuskom Publik Kemhan, **Pemimpin Redaksi:** Kolonel Inf Drs. Silvester Albert T, M.A., **Wakil Redaksi:** Drs. Zul Asril, **Redaksi:** Ari Yulianto, S.Sos, M.M., Letkol Sus Trisatya W, M.IT., Mayor Inf Barnes M, M. Sc., Mutiara Silaen, S.Ikom., **Desain Grafis:** Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom., Eko Prasetyo, S.Kom., Imam Rosyadi, **Fotografi:** Bid. BRA, **Percetakan & Sirkulasi:** Nadia Maretti, S.Kom, M.M., **Diterbitkan Oleh:** Puskom Publik Kemhan, Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

RAPIM KEMHAN 2015:

PEMBANGUNAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA YANG BERKELANJUTAN, DIDUKUNG OLEH KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN DAN SEMANGAT BELA NEGARA SERTA JIWA KEMARITIMAN, GUNA TERWUJUDNYA PERTAHANAN NEGARA YANG TANGGUH

HIGH OFFICIAL MEETING OF THE MINISTRY OF DEFENSE 2015:

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL DEFENSE SYSTEM, SUPPORTED BY DEFENSE INDUSTRY INDEPENDENCE AND NATIONAL DEFENSE SPIRIT AS WELL AS MARITIME SPIRIT, TO CREATE STRONG NATIONAL DEFENSE

Oleh: Tim Redaksi

Tahun 2015 merupakan awal program dari Kabinet Kerja dalam rangka menata pembangunan nasional menuju kemandirian. Kompleksitas ancaman harus dapat diatasi oleh Pemerintah termasuk Kemhan sebagai salah satu pengemban fungsi pertahanan negara. Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini juga disusun berdasarkan visi Pemerintahan tahun 2014 – 2019 yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Rapat Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan sarana komunikasi dalam rangka untuk menyampaikan refleksi tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015. Rapim tersebut dipimpin oleh Menteri Pertahanan Bapak Ryamizard Ryacudu dan dihadiri Kepala Staf Angkatan, Kasum TNI mewakili Panglima TNI, pejabat teras TNI/Angkatan serta segenap pejabat Kemhan. Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2015 kali ini bertemakan “Pembangunan sistem pertahanan negara yang berkelanjutan, didukung oleh kemandirian industri pertahanan dan semangat bela negara serta jiwa kemaritiman, guna terwujudnya pertahanan negara yang tangguh”.

Pelaksanaan Rapim Kemhan dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja satuan kerja (Satker) unit organisasi (UO) tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015 dengan cara menyatukan persepsi di lingkungan para pejabat Kemhan agar memiliki persamaan pemahaman dalam pelaksanaan program kerja dalam tahun 2015.

Rapim Kemhan ini merupakan Rapim pertama di era Kabinet Kerja. Hal ini menunjukkan kesiapan Kementerian Pertahanan dalam menyongsong tugas di tahun 2015. Melalui Rapim ini diharapkan adanya sinergitas dan koordinasi yang lebih erat lagi demi suksesnya tugas-

The year 2015 will be a beginning of the Work Cabinet program to start national development towards independence. Complexity of the threats must be able to be solved by the government, including the Ministry of Defense, as one of the caretakers of the National Defense function. The 2015 National Defense Policy has been arranged based on the legislation. The policy has also been arranged based on the government’s 2014 – 2019 vision, that is to realize sovereign and independent Indonesia, which has a personality based on mutual cooperation.

The High Official Meeting (Rapim), held by the Ministry of Defense, was a means of communication to submit the reflection of 2014 and projection of 2015. The meeting was chaired by Minister of Defense, Ryamizard Ryacudu, and attended by the Chiefs of Staff, the General Chief of Staff of the Indonesian Armed Forces representing Commander of the Indonesian Armed Forces, Top Officials of the Indonesian Armed Forces, and all officials of the Ministry of Defense. The High Official Meeting of the Ministry of Defense 2015 had the theme “Sustainable development of the national defense system, supported by the state industry independence and the national defense spirit as well as maritime spirit, to realize strong national defense”.

The High Official Meeting of the Ministry of Defense was aimed at evaluating implementation of the work programs of the work units (Satker) of the organization units (UO) of 2014 and the projection in 2015, by unifying the perception amongst officials of the Ministry of Defense so that they have the same understanding in the implementation of the work programs in 2015.

The Management Meeting of the Ministry of Defense was the first in the Work Program era. It showed the readiness of the Ministry of Defense in welcoming tasks in 2015. Through the meeting, closer synergy and coordination were expected for the successful organization



tugas penyelenggaraan pertahanan negara ke depan.

Mengacu pada Program Kabinet Kerja, Kementerian Pertahanan telah merumuskan Pedoman Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Diharapkan kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara akan berpedoman pada Produk tersebut.

Dalam sambutan pembukaan Rapim, Menteri Pertahanan menyampaikan tentang pertahanan negara sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. Untuk merealisasikan usaha tersebut, maka pengelolaan sistem pertahanan negara berpedoman pada visi, misi dan Nawacita Kabinet Kerja Pemerintahan, yang dirumuskan dalam kebijakan dan rencana strategis pertahanan negara. Pembangunan pertahanan negara tidak hanya ditujukan pada pertahanan militer juga mensinergikan dengan pertahanan nirmiliter sebagai wujud kesemestaan.

Orientasi pembangunan pertahanan negara baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter harus memperhatikan geopolitik dan geostrategik Indonesia sebagai negara kepulauan serta sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Membangun pertahanan yang kuat memerlukan Alutsista yang canggih dan modern. Salah satu upaya perwujudannya adalah dengan pembangunan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Tentunya diperlukan pengelolaan manajemen yang visioner melalui peningkatan kreatifitas, inovasi, mengandalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki idealisme dan intelektualisme serta memiliki daya saing lptek yang tinggi.

Dari aspek nirmiliter, perlu terus melakukan penguatan

of the national defense in the future.

In reference to the Work Cabinet program, the Ministry of Defense has formulated 2015 – 2019 National Defense Guidance. It is hoped that implementation of the National defense will refer to the product.

In his opening speech in the High Official Meeting, the Minister of Defense stated that the national defense was all efforts to defend the state's sovereignty, the integrity of the region of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and the safety of the whole nation from any threat and disturbance. To realize the efforts, the National Defense system is managed with guidance to the vision, mission, and Nawacita of the Work Cabinet, which had been formulated in the policy and strategic plan of the National Defense. Development of the national defense is not just aimed at the military defense, but also at synergizing the non-military defense as totality.

The orientation of the national defense, both military as well as non military, must take Indonesia's geopolitics and geo-strategy as well as the total defense system as an archipelago into consideration. Building strong defense requires sophisticated and modern main weaponry system. One of the efforts to realize it is by developing a strong, independent and competitive defense industry. It certainly needs visionary management through an increase in creativity and innovation, which rely on human resources that have idealism and intellectualism as well as high science and technology competitiveness.

In terms of the non-military aspect, an awareness of the national defense must be strengthened. A fighting spirit and patriotism as well as a willingness to sacrifice are strength that is able to make grow togetherness and

kesadaran bela negara. Jiwa juang dan semangat patriotisme serta rela berkorban merupakan kekuatan yang mampu menumbuhkan kebersamaan dan sinergitas warga negara dalam membangun dan mempertahankan negara.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015 diarahkan pada pencapaian pembangunan sistem pertahanan negara yang berkelanjutan didukung oleh kemandirian industri pertahanan dan semangat bela negara serta penguatan poros maritim guna terwujudnya pertahanan negara yang tangguh, dengan tetap konsisten terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan politik negara, yang diorientasikan pada hal-hal sebagai berikut :

Pertama, Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan agar negara dapat mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kedua, Pemberdayaan pertahanan negara dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga negara, dan sumber daya nasional dalam rangka menghadapi ancaman.

Ketiga, Pengerahan kekuatan pertahanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keempat, Pembangunan legislasi melalui percepatan proses pelaksanaan Program Legislasi Nasional bidang pertahanan.

Kelima, Pelaksanaan anggaran pertahanan negara secara tepat dan komprehensif terhadap semua kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan kemampuan pertahanan negara dengan tetap taat kepada prinsip tertib administrasi dan akuntabilitas.

Keenam, Pengawasan sebagai fungsi manajemen diberdayakan secara sinergis dalam bentuk pengawasan internal dan eksternal yang sudah melembaga sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sasaran Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015 antara lain:

- Peningkatan pembangunan Alutsista, Sarana pra sarana, profesionalisme dan Kesejahteraan;
- Peningkatan Industri Pertahanan dan penguasaan teknologi;
- Peningkatan Kerjasama Pertahanan dan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia;
- Pemenuhan Produk Kebijakan dan Legislasi terkait pertahanan Negara;
- Pengembangan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau

synergy of the people to build and defend the country.

Based on the vision and mission, the 2015 national defense policy will be targeted to achieve development of the sustainable national defense system, supported by independence in the defense industry and a national defense spirit as well as strengthening of the maritime axis to realize strong national defense, which consistently holds on Pancasila, Constitution 1945, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Bhineka Tunggal Ika, being guided by the legislation and the political policies oriented at the following points:

First, the national defense is developed to realize national security, which is capable of guarding the sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and the safety of the whole Indonesian people, of supporting economic independence by securing the maritime resources, and by expressing Indonesia's personality as an archipelago.

Second, the national defense is empowered by involving all people and national resources to face threats.

Third, the national defense strength is deployed according to the legislation.

Fourth, legislation is developed through an acceleration of the implementation process of the National Legislation Program in the defense sector.

Fifth, the defense budget is implemented in a correct and comprehensive way towards all development needs and maintenance of the state defense capability, by still adhering to the principles of good administration and accountability.

Sixth, supervision as a management function is empowered in a synergic way in the form of internal and external supervision, according to the procedure and mechanism as well as prevailing legislation.

Targets of the 2015 National Defense Policy include:

- Increased development of the main weaponry system, facilities, professionalism and welfare;
- Increase of the state industry and technology mastering;
- Increase of the defense cooperation and global peace-keeping mission;
- Fulfillment of the policies and legislations related to the state defense;
- Empowerment of the defense regions, security of the border regions and the outermost small islands by making an integrated security belt concept;
- Increase of research and development activities, synchronization of date and information as well as public communication;
- Budget management by maintaining the WTP Opinion status;
- Strengthening of the intelligence and management information system by the provision of accurate,



Kecil Terluar dengan menyusun konsep sabuk pengamanan (*security belt*) yang terpadu;

- Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan, sinkronisasi data dan informasi serta komunikasi publik;
- Pengelolaan anggaran dengan tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Penguatan Intelijen dan Sistem Informasi Pimpinan dengan tersedianya data intelijen dan sistem informasi pimpinan yang akurat, *update* dan *real time*;
- Penguatan Sistem Pengamanan Informasi Pertahanan Negara berbasis Pertahanan Siber;
- Peningkatan pembinaan personel TNI, melalui koordinasi dengan Mabes TNI/Angkatan dan Kementerian serta lembaga terkait dalam rangka penempatan para Pamen dan Pati TNI (yang belum mendapatkan penempatan struktural);
- Meningkatkan kemampuan Kemhan/TNI dalam menghadapi ancaman nyata seperti terorisme, bencana alam dan wabah penyakit;
- Menjadikan kesadaran bela negara sebagai gerakan nasional (revolusi mental bidang pertahanan).

Tantangan ke depan juga sangat dinamis sehingga memerlukan langkah cepat dan antisipatif. Untuk itu sebelum mengakhiri Rapim Kemhan TA. 2015, dalam

updated and real time intelligence data and management information system;

- Strengthening of the state defense information securing system based on cyber defense;
- Increase of development of the Indonesian Armed Forces personnel through coordination with the Indonesian Armed Forces headquarters and the Ministry as well as related institutions to place middle and high officers of the Indonesian Armed Forces (those who have not got a structural placement);
- Increase of the capability of the Ministry of Defense/ Indonesian Armed Forces to face real threats, such as terrorism, natural disasters, and epidemy;
- To make the national defense awareness a national movement (mental revolution in the defense sector).

Future challenges are also dynamic that they need fast and anticipative steps. Before closing the High Official Meeting of the Ministry of Defense of 2015 Budget Year, in his speech, the Ministry of Defense stressed on some points as follow:

- a. The National Defense policy for the 2015 Budget Year should become a reference of the Ministry of Defense as policy formulator, and the Indonesian Armed Forces as the main component of the national defense.
- b. Coordination and synergy with all stakeholders should be increased to realize strong national defense.

sambutannya Menteri Pertahanan memberikan beberapa penekanan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pertahanan Negara TA 2015 hendaknya dijadikan acuan oleh jajaran Kementerian Pertahanan sebagai perumus kebijakan dan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara.
- b. Tingkatkan terus koordinasi dan sinergitas dengan segenap pemangku kepentingan dalam mewujudkan pertahanan Negara yang kokoh dan kuat.
- c. Pedomani peraturan dan perundang-undangan serta regulasi yang mengatur sistem pertahanan negara.
- d. Gunakan anggaran negara seefisien dan seefektif mungkin sesuai aturan, hindari korupsi dan kolusi.
- e. Segera menyelenggarakan rapat kerja teknis guna tindak lanjut kebijakan pertahanan negara 2015.

Melalui pemahaman yang sama akan kebijakan pertahanan negara, akan tercipta sinergitas yang kuat sehingga program-program akan dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Kebijakan pertahanan tersebut menjadi pedoman dan pegangan dalam membangun kekuatan pertahanan negara. Pertahanan negara yang kuat harus ditopang dengan kebijakan yang tepat sebagai pedoman dan arah pembangunan pertahanan negara. Implementasi kebijakan akan tepat sasaran manakala didasarkan pada kebijakan yang baik. Kegiatan Rapim seperti ini menjadi wahana untuk saling mensinkronkan langkah nyata ke depan dan berharap melalui pertemuan ini, semakin meningkatkan sinergitas dalam penyelenggaraan pertahanan negara.***

- c. The legislation and regulations should be a guidance that regulates the national defense system.
- d. The state budget should be used in the most efficient and effective way according to the regulation, avoid corruption and collusion.
- e. A technical workshop meeting should be immediately held as a follow up to the 2015 national defense policy.

Through a same understanding on the national defense policy, a strong synergy will be created so that the programs will be well and successfully executed. The defense policy will become guidance in development of the state defense strength. A strong national defense must be supported by a correct policy as guidance and direction of Development of the National Defense. Implementation of the policy will be correct when it is based on a good policy. The High Official Meeting was a means to synchronize concrete steps in the future and the meeting was expected to increase synergy in organizing the national defense.***



STRATEGI PERANG SUN TZU: PERSPEKTIF INDONESIA

SUN TZU'S WAR STRATEGY INDONESIA'S PERSPECTIVE

Oleh: Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamssoeddin



Sumber: <http://www.usnc81.com>

WHEN AND HOW IS SUN TZU'S THEORY KNOWN IN INDONESIA?

When? Chinese literature has long been known in Indonesia. It was the Dutch and British colonialists, who brought translation of philosophic books from China to Indonesia since the 18th century. The first president of the Republic of Indonesia, Sukarno for example, frequently mentioned Chinese movement figures in his speeches. Specifically, President Sukarno never mentioned the name Sun Tzu, however, some key terms of the military strategy, such as "win the heart and mind of the people, control the enemy's logistics, control the enemy's weapons" show that he had read books on Sun Tzu. At least, he had learned from his teacher, one of Indonesia's founding fathers, named HOS Tjokroaminoto.

Sun's theory rapidly developed by the end of 1990's with the opening of information access through the internet. The 1998 reform era has encouraged free publication, foreign literatures became a part of the public libraries. The book *The Art of War* in the Indonesian version is freely sold in book stores and discussed in many seminars in Indonesia, on Sun Tzu's theory as an accurate business strategy.

JUSTIFICATION OF SUN TZU'S THEORY IN INDONESIA

Although intransparent, in general, Indonesian military leaders apply Sun Tzu's strategy with their territorial doctrine. So do the intelligent activities to raise "to win the heart and mind of the people". It shows that Sun Tzu's theory has long been known in Indonesia, in the form of field implementation. During the war to maintain Indonesia's independence in 1947-1949, the leading figure in the Indonesian guerilla war, General Sudirman, was known to highly respect the people's rights and property.

General Sudirman was convinced that a nation's independence was built on thousands of lives, property of the people and the nation, which could not be eliminated by anyone.

For General Sudirman, people and the soldiers were just like water and fish, inseparable. Integrity, simplicity, fighting spirit against the Dutch ultimatum, physically shown by General Sudirman, made his men and the people willingly sacrifice to defend his fights. People became protector and eyes and ears of the fighters, who

KAPAN DAN BAGAIMANA TEORI SUN TZU DIKENAL DI INDONESIA ?

Kapan? Literatur dari Tiongkok telah lama dikenal di Indonesia. Penjahat Belanda dan Inggris lah yang membawa terjemahan buku-buku filosofi dari Tiongkok ke Indonesia sejak abad 18-an. Presiden Pertama RI Sukarno misalnya, kerap menyebut nama tokoh-tokoh pergerakan Tiongkok ketika ia aktif berpidato. Secara spesifik, Presiden Sukarno tidak pernah menyebut nama Sun Tzu, namun beberapa ungkapan kunci tentang strategi militer, seperti "rebut hati dan pikiran rakyat, kuasai logistik musuh, kuasai persenjataan musuh menunjukkan bahwa ia pernah membaca buku tentang Sun Tzu. Paling tidak ia belajar dari gurunya, seorang *Founding Fathers* Indonesia bernama HOS Tjokroaminoto.

Teori Sun Tzu kembali berkembang pesat pada penghujung tahun 1990-an seiring dengan terbukanya akses informasi melalui internet. Era reformasi 1998 mendorong publikasi bebas, literatur asing telah menjadi bagian perpustakaan publik. Buku *The Art of War* versi Bahasa Indonesia kini dijual bebas di toko buku dan telah banyak seminar di Indonesia yang mengangkat Teori Sun Tzu sebagai strategi bisnis yang jitu.

JUSTIFIKASI TEORI SUN TZU DI INDONESIA

Walaupun tidak secara transparan pada umumnya para pemimpin militer Indonesia, dengan doktrin teritorialnya telah menerapkan strategi Sun Tzu. Demikian pula dengan kegiatan intelijen penggalangan *“to win the heart and mind of the people”*. Hal ini menunjukkan bahwa Teori Sun Tzu memang telah lama dikenal di Indonesia, dalam bentuk implementasi di lapangan. Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1947-1949, Tokoh terkemuka dalam perang gerilya Indonesia adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam bergerilya beliau dikenal sangat menghormati hak-hak dan harta benda rakyat.

Panglima Besar Jenderal Sudirman yakin bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan diatas himpunan runtunan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga.

Bagi Panglima Besar Jenderal Sudirman, rakyat dan tentara itu bagaikan air dan ikan, sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Integritas, kesederhanan, semangat juang dan sikap pantang menyerah terhadap ultimatum Belanda yang secara fisik ditunjukkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman telah membuat anak buah dan rakyat rela berkorban untuk membela perjuangannya. Rakyat telah menjadi pelindung dan sekaligus mata telinga para pejuang yang sedang bergerilya di hutan sekitar perkampungan. Bekal logistik untuk mendukung anak buahnya juga berasal dari lumbung rakyat yang terpaksa harus dibeli dengan uang hasil penjualan perhiasan istrinya. Tindakan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang tidak pernah merugikan rakyat, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat telah mengilhami TNI untuk menjadikannya contoh dalam membina wilayah teritorial di masa damai.

Strategi Gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman menunjukkan suatu justifikasi penerapan Teori Sun Tzu di lingkungan militer Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Pada era tahun 1970-an, seorang Komandan Grup-1 KOPASSANDHA bernama Kolonel Inf Wismoyo Arismunandar dalam melaksanakan Pembinaan Satuan sudah mulai menjadikan Teori Sun Tzu sebagai referensi memotivasi para komandan satuan bawah dalam memimpin pasukannya. Ajaran Sun Tzu yang paling populer waktu itu misalnya *“Ketahuilah musuhmu dan kenalilah dirimu, maka engkau akan menang dalam beratus kali pertempuran.”*



Sumber: <http://semestanews.wordpress.com>

Jenderal Sudirman

were fighting in guerillas in the woods surrounding villages. Their logistics to support them came from the people's barns, which had been inevitably bought with the money from selling his wife's jewelries. General Sudirman's actions, which never harmed the people, did not scare and hurt the people. Instead, they inspired the Indonesian Armed Forces to make them an example in development of a territorial region during a peace period.

General Sudirman's strategy shows a justification of Sun Tzu's theory in Indonesia's military environment during the early independence period.

In 1970's, a commander of KOPASSANDHA Group-1, named Colonel Infantry Wismoyo Arismunandar, made Sun Tzu's theory a reference in the implementation of Units Development, to motivate the units commanders in leading their troops. The most popular Sun Tzu's teaching at that time was *“Know your enemy and know yourself, then you will win in hundreds of battles”*.

In 2009, Sun Tzu's theory was officially taught as a reference in Strategy Curriculum at Indonesia's Defense University. In 2013, Sun Tzu's theory was introduced to students of the Staff Command College.

Pada tahun 2009 secara formal Teori Sun Tzu baru diajarkan sebagai referensi Kurikulum Strategi di Universitas Pertahanan Indonesia. Tahun 2013 Teori Sun Tzu mulai dikenalkan kepada siswa Sesko Angkatan.

Banyak Teori Sun Tzu yang dapat diaplikasikan dalam dunia militer, bisnis, *sport* dan pendidikan, namun pada kesempatan kali ini, kami hanya akan menyampaikan beberapa contoh teori yang cocok untuk dunia militer, politik dan bisnis di Indonesia sebagai berikut :

A GREAT GENERAL WINS WITHOUT BATTLE

Dalam memenangkan hati dan pikiran rakyat di suatu wilayah, TNI melaksanakan strategi Pembinaan Teritorial. Kegiatan Binter sama sekali tidak menggunakan alat peralatan perang.

Adapun sasaran pembinaan teritorial adalah terwujudnya Lima Kemampuan Teritorial tingkat Satuan” yang meliputi: Kemampuan Temu Cepat dan Laport Cepat, Kemampuan Manajemen Teritorial, Kemampuan Penguasaan Wilayah, Kemampuan Pembinaan Perlawanan Rakyat dan Kemampuan Komunikasi Sosial. Tercapainya 5 sasaran Binter yang tidak lain sama dengan tercapainya penguasaan suatu wilayah geografi lengkap dengan penduduknya dengan cara membantu atasi

Many of Sun Tzu’s theory are applicable in the military, business, sports, and education. However, in this opportunity, I’d only like to present some theory examples for the military, politics and business in Indonesia, as follows:

A GREAT GENERAL WINS WITHOUT BATTLE

To win the heart and mind of the people in a region, the Indonesian Armed Forces apply a Territorial Development strategy. Such an activity does not use any war equipment whatsoever.

The targets of Territorial Development is the realization of Five Territorial Capacities in Units Levels, including the Capacity of Fast getting and Fast Reporting, the Capacity of Territorial Management, the Capacity of Regional Mastering, the Capacity of People’s Resistance Development, and the Capacity of Social Communication. The achievement of five targets of Territorial Development, which is the same with the controlling of the geographical region complete with its people by helping solve the people’s problems without using any war equipment, shows justification towards the application of Sun Tzu’s theory, that is “A Great General Wins without Battle”.

On the contrary, the Indonesian Armed Forces use soft





kesulitan masyarakat tanpa menggunakan alat peralatan perang menunjukkan justifikasi terhadap aplikasi teori Sun Tzu “A GREAT GENERAL WINS WITHOUT BATTLE”.

Sebaliknya TNI menggunakan kemampuan *soft power* sebagai pendekatan yang didukung peralatan teknis antara lain peralatan konstruksi dan peralatan medis serta keterampilan teknis perorangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat, konkritnya untuk keperluan kemanusiaan.

APLIKASI SUN TZU DALAM BISNIS.

“A GREAT GENERAL WINS WITHOUT BATTLE” diaplikasikan dengan strategi “Merebut pasar tanpa merusaknya”. Sun Tzu berkata: “Umumnya dalam suatu perang, kebijakan terbaik adalah untuk mengambil keadaan secara utuh, merusaknya adalah lebih rendah daripada itu. “Untuk memenangkan seratus kemenangan dalam seratus pertempuran bukanlah puncak keterampilan. Untuk menaklukkan musuh tanpa pertempuran adalah puncak keterampilan”.

Demikian pula dalam bisnis. Karena tujuan dari bisnis adalah untuk bertahan hidup dan berkembang, maka kita harus merebut pasar. Namun, kita harus melakukannya sedemikian rupa sehingga pasar tidak hancur dalam proses merebutnya. Sebuah perusahaan dapat melakukan hal ini dalam beberapa cara, seperti menyerang bagian pasar yang kurang terlayani atau dengan menggunakan pendekatan halus, tidak langsung, pada pangsa pasar

power capability as an approach, supported by technical equipment, among others construction and medical equipment, and individual technical skill to help solve the people’s problems, concretely for human needs.

SUN TZU’S APPLICATION IN BUSINESS

“A GREAT GENERAL WINS WITHOUT BATTLE” is applied with the “Grab the market without destructing it” strategy. Sun Tzu once said, “Generally in a war, the best policy is to take a condition completely; destructing it is lower than that. To win a hundred victories in a hundred battles is not the peak of skill. To defeat enemies without any battle is the peak of skill. “

It also goes in business. As the purpose of business if to survive and develop, we have to grab the market. However, we have to do it as such so that the market is not destructed in the grabbing process. A company is able to do it in some ways, such as by attacking the less served part of the market or by using a soft and indirect approach to a low market share, which will not attract the competitor’s attention. What should be avoided in these steps is price war. Research shows that an attack by too-fast price reduction will get a negative respons from the competitors, and leave the market without any profit. For example, how batik with high quality and relative high price can grab the domestic market, defeating imported clothes. So can Indonesian original handicrafts and culinaries, which grow with prominent brands without destructing the traditional market.

yang rendah yang tidak akan menarik perhatian pesaing. Apa yang harus dihindari disemua langkah ini adalah perang harga. Penelitian telah menunjukkan bahwa serangan dengan membanting harga yang terlalu cepat akan mendapat tanggapan agresif dari pesaing, serta meninggalkan pasar tanpa keuntungan. Contohnya adalah bagaimana baju batik tulis dengan kualitas tinggi dan harga yang memang relatif mahal mampu merebut pasar di tanah air sendiri, mengalahkan baju-baju import. Demikian pula dengan produk kerajinan tangan dan kuliner asli Indonesia yang telah tumbuh dengan nama dagang unggulan (*branded*) tanpa merusak pasar tradisional.

HINDARI KEKUATAN PESAING BISNIS ANDA, DAN MENYERANG KELEMAHAN MEREKA

Sun Tzu berkata: "Pasukan tentara bisa diibaratkan seperti air, yang mengalir berkelok menghindari ketinggian dan mengalir deras menuju dataran rendah, sehingga strategi yang dikembangkan adalah menghindari kekuatan dan menyerang titik lemah/*Center of Gravity*" .

Cara berperang barat seringkali digunakan dalam persaingan bisnis, hal ini menyebabkan banyak perusahaan memulai serangan bisnisnya secara langsung terhadap titik terkuat pesaing bisnis mereka. Pendekatan ini membuat strategi bisnis mengarah ke pertempuran gesekan, yang akan berakhir dengan ongkos yang sangat mahal bagi semua pihak yang terlibat. Sebaliknya, dengan pendekatan Sun Tzu, maka kita harus fokus menyerang

AVOID THE STRENGTHS OF YOUR BUSINESS COMPETITORS, AND ATTACK THEIR WEAKNESSES

Sun Tzu once said, "Soldiers can be said as water that flows to avoid height and toward low lands, so that the strategy developed is to avoid strengths and to attack the weaknesses."

The western way of fighting is often used in the business competition, causing many companies to start their business attacks directly to the strongest point of their business competitors. Such an approach makes a business strategy lead to friction, which ends up by a high cost for all parties involved. On the contrary, with Sun Tzu's approach, we have to focus on attacking the competitor's weaknesses, to maximize the profit and minimize the use of resources.

IF YOU KNOW THE ENEMY AND KNOW YOURSELF, YOU NEED NOT FEAR THE RESULT OF A HUNDRED BATTLES.

In business, three steps, which are the essence of Sun Tzu's teachings: to know yourself well, to know your enemy, and to know where we are, are the same with the positioning in marketing theory. They are like twins. Uniquely, although theoretically you can win a war in just these three steps, many people complain that Sun Tzu's theory is not that simple. There are some things that need to be avoided in the application; in knowing yourself,



Sumber: <http://puspentni.mil.id>



kelemahan *competitor*, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan penggunaan sumber daya.

KENALILAH MUSUHMU DAN KENALILAH DIRIMU, NISCAYA ANDA AKAN BERJAYA DALAM RATUSAN PERTEMPURAN (IF YOU KNOW THE ENEMY AND KNOW YOURSELF, YOU NEED NOT FEAR THE RESULT OF A HUNDRED BATTLES).

Dalam Bisnis tiga langkah yang merupakan intisari ajaran Sun Tzu yaitu mengenal diri Anda dengan baik, mengenal musuh Anda, dan mengenal tempat di mana kita sama dengan teori *positioning* dalam pemasaran. Mereka mirip saudara kembar. Uniknya, walau secara teori Anda bisa menang perang hanya dalam tiga langkah itu, banyak orang mengeluh strategi Sun Tzu tidak sesederhana itu. Ada beberapa yang perlu dihindari dalam penerapannya yaitu dalam langkah mengenal diri sendiri, pelaku bisnis jangan sampai hilang percaya diri atau kebalikannya menjadi sombong dan arogan setelah berhasil meraih sebuah sukses karena akan bisa gagal bila abaikan kelemahan dan kekuatannya. Jangan sampai lengah mempelajari kekuatan musuh serta kita perlu menggunakan intelijen untuk memastikan keberhasilannya. Ada pepatah Cina bahwa kemenangan tertinggi adalah menangkan perang tanpa satu pertempuran pun artinya, kalau kelemahan musuh sudah diketahui persis, kita akan selalu beberapa langkah lebih maju dari musuh itu. Jadi, kita bisa menghindari perang terbuka, seperti perang harga yang merugikan kedua pihak. Yang tidak kalah

don't lose self confidence or the contrary, don't be arogan after obtaining a success as it can lead to a failure if we ignore the weaknesses and strengths. Don't be careless in learning the competitor's strengths and we need to use intelligence to ensure the success. There's a Chinese saying that the highest victory is to win the war without any battle. It means that if we know exactly the enemy's weaknesses, we will be some steps more advanced than the enemy. So, we can avoid an open war, such as price war which will harm both parties. What is also important is to know the market condition in our business. It is difficult as it requires field experiences.

LESSON LEARNED

Sun Tzu's strategy is a thinking concept that is a fighting strategy, which has been proven to be actual and applicative from time to time. It is actual because Sun Tzu's strategy always suits with the human civilization and development of the war technology, and can be applied in various forms of war. Sun Tzu's theory is even compatible in the era of irregular war, such as Non State Actor fighting against huge strength. Although Sun Tzu was born in the eastern culture, western strategy experts combine Sun Tzu's strategy with Clausewitz war strategy in various phases of their military operation. In Indonesia, particularly in the Defense University Command Staff College, Sun Tzu's strategy is used as one of the references in the strategy.

Sun Tzu's strategy always inspires the creation of



pentingnya pengenalan kondisi market dalam bisnis kita dan ini termasuk hal yang sulit karena sangat diperlukan pengalaman di lapangan.

LESSON LEARNED

Sun Tzu's Strategy adalah suatu konsep berpikir berupa strategi berperang yang telah terbukti bersifat aktual dan tetap aplikatif dari waktu ke waktu. Aktual karena strategi Sun Tzu selalu cocok dengan perkembangan peradaban manusia maupun dengan perkembangan teknologi perang dan dapat dipakai di berbagai wujud peperangan. Teori Sun Tzu bahkan sangat cocok dipakai di era perang *irregular*, seperti perlawanan *Non State Actor* terhadap kekuatan yang besar. Strategi Sun Tzu dapat diaplikasikan oleh para strategum dari berbagai bangsa. Meskipun Sun Tzu lahir dari budaya Timur, para strategis Barat bahkan mengawinkan strategi Sun Tzu dengan strategi perang Clausewitz pada berbagai tahap operasi militer mereka. Di Indonesia, khususnya di Universitas Pertahanan dan pendidikan Sesko Angkatan, strategi Sun Tzu telah dipakai sebagai salah satu referensi dalam kurikulum strategi.

Sun Tzu's Strategy selalu menginspirasi terciptanya pikiran-pikiran segar dalam menyusun strategi militer dan bisnis pada masa kini dan mendatang. Keindahan kalimat Sun Tzu yang sarat dengan makna yang dalam seringkali mengilhami para strategis dalam menemukan solusi

fresh thoughts in establishing a military and business strategy at present and in the future. Sun Tzu's beautiful and meaningful sentences often inspire strategic experts to find a solution to problems. Sun Tzu was very expert in symbolizing human's character with the nature, such as soldiers' character with the flowing water, so that his teachings are easy to understand. In Indonesia, poems and spells are sometimes the pattern of thoughts of the Indonesian people. Aphorisms and messages of public figures are a part of the trick to break a deadlock in verbal communications.

Sun Tzu's Strategy always emphasizes the importance of a strategy than just a strategy. Sun Tzu once said, "Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat. The success of a modern strategy is always measured with three things, whether the strategy formulation is compatible, acceptable, and implementable. To fulfill these three requirements, the strategy needs to be made in a hierarchy and implemented according to the command chain.

Sun Tzu's Strategy is a sharp analysis knife to help make a study on security and business. In the military and business world, analysis can start carefully by understanding self strengths and weaknesses and our main opponents. An example is SWOT (Strength,

suatu masalah. Sun Tzu sangat piawai mengibaratkan watak manusia dengan alam, watak tentara dengan air yang mengalir, sehingga ajarannya mudah dimengerti. Di Indonesia, kalimat syair, pantun dan mantra acapkali menjadi pola berpikir bangsa Indonesia. Demikian juga kata-kata mutiara dan amanat tokoh terkenal telah menjadi bagian dari trik untuk memecah kebuntuan dalam berkomunikasi verbal.

Sun Tzu's Strategy selalu menekankan pentingnya suatu strategi dan tidak sekedar taktik. Sun Tzu berkata: Strategi tanpa taktik adalah rute paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan (*Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat*). Keberhasilan strategi modern selalu diukur dengan 3 hal yaitu apakah formulasi strategi tersebut (1) sesuai, (2) dapat diterima dan (3) memungkinkan untuk dilaksanakan? Agar dapat memenuhi ketiga syarat tersebut maka penyusunan strategi dibuat secara hirarki dan dilaksanakan sesuai rantai komando.

Sun Tzu's Strategy adalah pisau analisis yang tajam untuk membantu penyusunan suatu kajian di bidang keamanan dan bisnis. Dalam dunia militer dan bisnis, langkah analisis dapat dimulai dengan seksama dengan memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan lawan utama kita. Sebagai contoh adalah analisis model SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threats*). Dalam analisis SWOT, di luar kekuatan dan kelemahan ada juga peluang dan ancaman. Peluang dan Ancaman adalah faktor berpengaruh yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri atau di luar suatu perusahaan. Untuk menganalisis apakah sebuah strategi ofensif akan menjamin kemenangan, Sun Tzu mengajarkan agar selalu memperhatikan faktor moral, disiplin, kepemimpinan, cuaca dan medan disamping 9 situasi klasik.

Sun Tzu's Strategy mengingatkan para pemimpin untuk selalu melakukan langkah Persiapan. Sun Tzu berkata: "Prajurit jagoan itu menang dahulu baru kemudian pergi berperang, sementara prajurit pecundang itu pergi berperang dahulu baru kemudian berusaha untuk menang".

Penentuan keberhasilan itu ditentukan dalam persiapan yang mendetail dan tidak dalam eksekusi akhir. Dalam suatu rencana operasi militer bahkan disebutkan bahwa persiapan itu adalah 2/3 dari kemenangan yang harus dilakukan untuk menghindari kefatalan. Perencanaan yang mendetail juga memerlukan geladi, *rehearsal* dan uji coba agar dalam pelaksanaan sebenarnya kita tidak kehilangan momentum yang dapat membawa kerugian/korban. Orang bijak mengatakan *preparation meets opportunity*.

Sun Tzu's Strategy seperti doa Sapu jagat, karena bersifat universal dan fleksibel. Paling tidak ada 2 azas berperang yang sangat khas TNI yang sejalan dengan teori Sun Tzu, yaitu pantang menyerah dan rela berkorban.

Weakness, Opportunity and Threats) analysis, where in addition to strengths and weaknesses, there are also opportunities and threats. Opportunities and Threats are influencing factors that develop both outside and inside a company. To analyze whether an offensive strategy will guarantee a victory, Sun Tzu taught us to always pay attention to moral, discipline, leadership, weather, and field factors apart from nine classical situations.

Sun Tzu's Strategy reminds leaders to always make preparatory steps. Sun Tzu once said, "A champion soldier always wins first before he goes to a war, while a loser soldier goes to a war first before he tries to win."

Success is determined in a detailed preparation rather than in the final execution. In a military operation plan, it is even said that the preparation is 2/3 of the victory, which must be executed to avoid fatality. A detailed preparation also needs a rehearsal and trial so that in the real execution, we will not lose a momentum, which will lead us to a loss/victim. A wise man says "preparation meets opportunity".

Sun Tzu's Strategy is like a comprehensive prayer as it is universal and flexible. At least, there are two war principles, which are typically of the Indonesian Armed Forces and in line with Sun Tzu's theory, including unwilling to surrender and willing to sacrifice.

First is the Unwilling to Surrender principle. Sun Tzu once said, "To run to fight in another time". The Indonesian Armed Forces apply a fighting tactic by going backward and consolidating. The troops go backward when according to an assessment and consideration, the whole action plan will fail. The doctrine of the Indonesian Armed Forces firmly states that the Indonesian Armed Forces will never surrender in any situation whatsoever in both battles as well as duties mandated by the state. The Indonesian Armed Forces also hold tight to the principle that to surrender is a total loss, to compromise is a half loss, and to go backward is not a loss.

In the business world, when we know that our business plan will fail, we need to take consolidating steps to take





Pertama adalah asas Pantang Menyerah. Sun Tzu berkata: “Lari untuk bertempur di lain waktu”. Tentara Nasional Indonesia menerapkan salah satu taktik pertempuran dengan melakukan pengunduran dan konsolidasi. Pengunduran pasukan dilakukan manakala sesuai penilaian dan pertimbangan bahwa seluruh rencana aksi akan mengalami kegagalan. Doktrin TNI menegaskan bahwa TNI tidak akan pernah menyerah dalam situasi apapun baik dalam pertempuran maupun tugas-tugas yang dilimpahkan oleh negara. TNI pun memegang prinsip bahwa menyerah adalah kekalahan total, kompromi adalah setengah kalah, mundur bukanlah sebuah kekalahan.

Dalam dunia bisnis, apabila kita mengetahui bahwa rencana bisnis kita akan mengalami kegagalan, maka perlu diambil langkah - langkah konsolidasi untuk mengambil kesempatan menuju keberhasilan.

Sun Tzu's Strategy mengajarkan para pemimpin untuk selalu menghargai waktu, momentum dan timing. Sun Tzu berkata: “Waktu adalah segalanya”

“Kualitas keputusan itu seperti menukik tepat waktu dari seekor elang yang memungkinkannya untuk menyerang dan menghancurkan korbannya. “Banyak orang membuat strategi dan keputusan bisnis yang bagus tetapi kemudian segalanya hancur karena salah *timing* pada saat mengeksekusinya. Kita perlu menahan dorongan nafsu dan perlu bersabar sejenak, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil keuntungan dari sebuah momentum. Jadilah seperti elang kata Sun Tzu. Kita sangat jarang mendapatkan kesempatan kedua untuk mengeksekusi keputusan secara efektif. Kemajuan teknologi seringkali membuat kita merasa lebih hebat dibandingkan dengan

an opportunity towards a success.

Sun Tzu's Strategy teaches leaders to always respect the time, momentum and timing. Sun Tzu once said, “Time is everything”.

“A decision quality is like an eagle dipping timely that enables it to attack and destroy its victim. Many people make a good strategy and business decision but they then are destroyed due to a wrong timing in the execution. We need to hold our lust and be patient, waiting for the right time to make a profit and a momentum. Be like an eagle, Sun Tzu said. We seldomly have a second chance to execute a decision effectively. Technology advances often make us feel more superior compared to our ancestors, who were more patient and persevering. The main principles of a strategy success remain unchanged. It is about time for us to not ignore history but to learn the lesson from the past so that we will have a better future instead.

CHALLENGES

On the contrary, we also see some challenges that the leaders must face when they want to apply Sun Tzu's theory.

Individual challenges in the decision-maker level:

It requires a high integrity. It requires someone trusted, one word and one action, who has a strong leadership and ability to be exemplary. Sun Tzu's theory is highly influenced by the war history in the past, which was colossal and linear land war, so that the leader had to be in the front line as exemplary for his men and control the situation in the field. Strategy expert must be a visionary. Sun Tzu's theory

nenek moyang kita yang lebih penyabar dan telaten. Padahal prinsip-prinsip pokok dari keberhasilan suatu strategi tidak berubah. Sudah saatnya kita tidak mengabaikan sejarah tetapi mempelajari pelajaran apa yang dapat kita petik dari masa lalu sehingga kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik

TANTANGAN

Sebaliknya kami juga melihat ada beberapa tantangan yang harus dihadapi para pemimpin ketika ingin mengaplikasikan teori Sun Tzu.

Tantangan individual di level pengambil keputusan:

Perlu integritas yang tinggi. Dibutuhkan seorang yang dapat dipercaya, satu kata dan satu perbuatan, memiliki kepemimpinan yang kuat dan mampu memberikan keteladanan. Teori Sun Tzu sangat dipengaruhi oleh sejarah peperangan di masa lalu yang sangat berwatak perang darat yang kolosal dan linier, sehingga pemimpin harus berada di barisan depan sebagai contoh anak buahnya dan menguasai situasi lapangan. Para strategem harus seorang yang visioner. Teori Sun Tzu mengedepankan strategi, bukan sekedar taktik, sehingga pencapaian sasaran tidak serta merta sekedar cepat merespon dan memiliki intelektualitas. Dalam mengaplikasikan langkah melakukan siasat diperlukan kreatifitas dan kemampuan berimajinasi yang kuat.

Para strategem harus profesional. Diperlukan ketekunan dan keahlian di bidang yang digeluti. Semakin sering seorang strategis berhadapan dengan masalah yang memerlukan solusi strategis, maka ia semakin matang. Profesionalitas ini diperlukan ketika ia harus tegar memformulasikan strategi yang apabila dilaksanakan akan bertentangan dengan nilai moral dan etika yang dianutnya. Teori Perang Sun Tzu yang menekankan pentingnya siasat yang sangat menuntut profesionalitas pelaksana strateginya. Dengan kata lain tingkat intelektualitas merupakan syarat utama.

REMARKS

Dari persepsi Indonesia, Teori Sun Tzu itu telah diimplementasikan dalam dunia militer dan bisnis semenjak berdirinya Republik Indonesia. Teori Sun Tzu berkembang pesat pada penghujung tahun 1990-an seiring dengan terbukanya akses informasi melalui internet. Kini Teori Sun Tzu telah menjadi referensi teori strategi di dunia pendidikan militer dan sipil.

Dari persepsi Indonesia, Teori Sun Tzu memberikan implikasi positif yang besar terhadap aspek politik, ekonomi dan pertahanan, serta bila dilihat dari persepsi kultural, Teori Sun Tzu sangat aplikatif di Indonesia mengingat adanya kesamaan dan korelasi budaya yang sangat kuat diantara kedua bangsa Indonesia dan bangsa Tiongkok.***

focuses on strategy, and not just a tactic, so that the target achievement is not just to respon rapidly and has intellectuality. To apply the steps to execute the strategy, it requires creativity and strong ability to imagine.

Strategy expert must be professional. It requires perserverance and expertise in the field in which we are involved. The more frequent a strategic expert faces a problem that needs a strategic solution, the more mature he will become. Such professionalism is required when he must be strong in formulating the strategy, which if executed, will be contradictory with the moral and ethical values that he embraces. Sun Tzu's war theory emphasizes the importance of a strategy that needs professionalism of the executor. In otherwords, the intellectuality level is the main requirement.

REMARKS

In Indonesia's perception, Sun Tzu's theory has been implemented in the military and business world since the establishment of the Republic of Indonesia. Sun Tzu's theory rapidly developed by the end of 1990's in line with the opening of information access through the internet. Today, Sun Tzu's theory has become a reference of the strategy theory in both military and civil education.

From Indonesia's perception, Sun Tzu's theory provides a positive and large implication towards the political, economic and defense aspects. Seen from the cultural perception, Sun Tzu's theory is very applicative in Indonesia considering the strong cultural similarities and correlation between the two nations, Indonesian and Chinese.***



ESENSI STRATEGI KEAMANAN NASIONAL

THE ESSENCE OF NATIONAL SECURITY STRATEGY

Oleh: Bantarto Bandoro

Dosen Senior di Unhan dan *Founder* IDSR , Jakarta

Dalam salah satu tulisannya yang terbit pada tahun 1973, Daoed Joesoef mengatakan bahwa negara selalu hidup dalam dunia yang penuh gangguan dan ancaman, dan gangguan dan ancaman itu tidak hanya muncul dalam masa perang, tetapi juga dalam masa damai. Gangguan dan ancaman tersebut muncul sebagai akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan strategi negara yang bersangkutan, baik itu lingkungan domestik maupun internasional. Ini berarti bahwa sebagai bagian dari sistem internasional, Indonesia tidak dapat menghindari dari perubahan-perubahan tersebut. Indonesia bahkan bisa menjadi bagian dari proses perubahan itu sendiri, tentu dengan dua konsekuensi: terpuruk karena kapasitas domestiknya tidak mampu mengatasi akibat dari perubahan tersebut, atau menarik manfaat dari perubahan itu, karena kapasitasnya memadai, untuk kepentingan pembangunan nasional secara keseluruhan.

In one of his writings, published in 1973, Daoed Joesoef said that the country has always lived in a world full of distractions and threats, and harassment and threats not only arise in times of war, but also in peacetime. Disturbances and threats emerged as a result of the changes that occur in the strategic environment of the country concerned, both domestic and international. This means that as part of the international system, Indonesia cannot shy away from these changes. Indonesia could even be part of the process of the change itself, of course with two consequences: slumped as domestic capacity is not able to overcome the consequences of these changes, or to benefit from the change, because of insufficient capacity, for the sake of national development as a whole.

Whatever the consequences, policy measures in response to environmental changes still need to be taken,



Sumber: Foto Ahmad Ibrahim

Apapun konsekuensinya, langkah kebijakan sebagai jawaban terhadap perubahan lingkungan tetap harus diambil, apalagi jika dampak dari perubahan itu mempengaruhi sistem keamanan dan pertahanan negara.

Kebijakan keamanan nasional Indonesia, jika semuanya sudah tercakup dalam Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional yang hingga kini belum juga disahkan oleh DPR, dianggap utuh dan komprehensif hanya jika ia dibuat dengan memperhatikan antara lain tiga faktor, yaitu (1) kondisi dan perkembangan dalam negeri; (2) lingkungan regional dimana Indonesia berada; dan (3) hubungan luar negeri Indonesia. Ketiga faktor ini tidak bisa dilihat terpisah satu dari yang lainnya. Keamanan nasional Indonesia dipengaruhi, walaupun tidak ditentukan, oleh berfungsinya dan hubungan antara ketiga faktor di atas.

Dalam lingkup politik domestik, Indonesia dianggap telah berubah, setidaknya di mata publik domestik, sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada level global. Perubahan-perubahan itu, disadari atau tidak, telah memunculkan persoalan dan tantangan baru, baik itu berasal dari bidang ekonomi maupun politik. Tantangan, walaupun bukan ancaman, keamanan baru justru muncul ketika negara berada dalam proses menuju sebuah demokrasi yang utuh. Sayangnya, pemahaman mengenai keamanan nasional dalam konteks demokrasi dan reformasi masih sangat minim. Apalagi, keamanan dalam konteks Indonesia, kerap diartikan sebagai sebuah fungsi yang dijalankan hanya oleh polisi. Padahal, keamanan seharusnya dalam dirinya juga mengandung unsur *full protection* terhadap seluruh bagian dari negara, yang berarti juga pertahanan negara.

Tantangan keamanan Indonesia di masa depan kelihatannya akan semakin kompleks dan beragam. Karena itu, Indonesia harus merancang sebuah desain baru strategi keamanan yang tidak hanya melihat ke depan dan mengantisipasi gangguan dan ancaman, tetapi juga membuat perkiraan-perkiraan. Selain itu, karena Indonesia merupakan bagian dari sistem internasional, hubungan internasional Indonesia merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembuatan strategi keamanan nasionalnya.

PENTINGNYA SEBUAH STRATEGI

Strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan dan harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang terjadi di masa depan. Jadi, sebuah strategi harus mencakup perkiraan-perkiraan mengenai apakah sesuatu akan terjadi dan kemudian berusaha menyiapkan tindakan-tindakan yang tepat untuk menanggulangi bila yang diperkirakan itu memang terjadi. Strategi ini bukanlah untuk meniadakan sama sekali hal yang diperkirakan akan terjadi, betapapun buruknya hal itu, tetapi strategi yang diambil harus menekan sekecil mungkin dampak buruk dari hal-hal yang diperkirakan akan terjadi.

Keamanan dan pertahanan adalah dua dari beberapa bidang kehidupan nasional yang tidak akan bebas dari guncangan (*turbulence*) yang terjadi di lingkungannya. Sebagai respon terhadap guncangan-guncangan tersebut, negara harus melakukan tiga tindakan penting,



Sumber: <https://rbsinternationaltraining.com>

especially if the impact of the changes seriously affect the security and defense system.

Indonesia's national security policy, if all components is to be included in the draft of the National Security Act, which until now has not been passed by Parliament, is considered to be a complete and comprehensive if it takes into account, among others things, three factors, namely (1) the conditions and developments in the country; (2) the regional environment where Indonesia is located; and (3) Indonesia's foreign relations. All these factors cannot be seen in isolation from one another. Indonesia's national security is influenced, if not determined, by the functioning and the relationship between those factors.

In the domestic political sphere, Indonesia is considered to have changed, at least in the eyes of the domestic public, in line with the changes that occurred on a global level. Changes that, consciously or not, has led to problems and new challenges, whether it comes from the field of economics and politics. The challenge, if not a threat, the country is facing in the context of national security is the process towards a full democracy.

Unfortunately, understanding of national security in the context of democracy and reform is still very minimal. Moreover, security in the context of Indonesia, often defined as a function that is executed only by the police. In fact, the security should in itself also contains elements of full protection to all parts of the country, which also means the country's defense.

Indonesian security challenges in the future seems to be increasingly complex and diverse. Therefore, Indonesia must design a new security strategies that not only future oriented and anticipate disruptions and threats, but also has the ability to make predictions. In addition, because Indonesia is part of the international system, Indonesia's international relations is a factor that cannot be ignored in making its national security strategy.

THE IMPORTANCE OF STRATEGY

Strategy is the overall decision that specifies conditional actions that will and must be implemented in order to cope with any situation that occurs in the future. Thus, a strategy should include calculations regarding whether something

yaitu merumuskan, memutuskan dan melaksanakan program pembangunan di kedua bidang tersebut. Tiga tahapan ini adalah bagian-bagian yang membentuk strategi.

Strategi dibutuhkan tidak hanya pada masa perang, tetapi juga pada masa damai. Proses globalisasi yang hingga kini masih berlangsung terjadi pada kondisi yang disebut terakhir. Karena globalisasi adalah sebuah sistem yang dinamik dimana interaksi antara para aktor semakin intensif dan kompleks dan hubungan kesaling tergantung juga semakin kuat, maka sulit dihindari bahwa karakteristik seperti itu akan memberi dampak kepada stabilitas, kemakmuran dan keamanan dalam negeri. Indonesia tidak dapat mengabaikan kenyataan demikian.

Karena lingkungan strategi Indonesia akan terus berubah dan proses globalisasi semakin kuat, Indonesia harus mengantisipasi dampak dari perubahan itu dengan merancang sebuah strategi melalui tiga tahapan di atas. Indonesia secara cermat harus mampu memperkirakan dampak perubahan lingkungan strategisnya setidaknya dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun mendatang terhadap keamanan nasionalnya. Ini berarti bahwa sebagai entitas politik yang terorganisasi dan dalam merancang strategi menghadapi dampak perubahan lingkungan, Indonesia harus melakukan tiga tindakan penting, yaitu: (1) mengambil keputusan-keputusan sehubungan dengan perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internalnya; (2) memobilisasi sumber-sumber daya untuk menjalankan keputusan yang telah

will happen and then trying to prepare the appropriate measures to cope with the predicted when it does happen. This strategy is not to eliminate all things are expected to happen, no matter how bad it is, but the strategy should be to minimizing the adverse effects of things that are expected to occur.

Security and defense are two of the few areas of national life which will not be free of shocks (turbulences) that occur in the environment. In response to these shocks, the state must do three important actions: is to formulate, determine and implement development programs in both areas. These three stages are the parts that make up the strategy.

Strategies are needed not only in times of war, but also in peacetime. The process of globalization which is still in progress occurs in the latter condition. Because globalization is a dynamic system in which the interaction between the actors and the increasingly intensive and complex interrelatedness of dependency relationship is also getting stronger, it is unavoidable that such characteristics would affect the stability, prosperity and security in the country. Indonesia cannot ignore this reality.

Because Indonesia's strategic environment will continue to change and the process of globalization is getting stronger, Indonesia must anticipate the impact of the changes by designing a strategy through the three steps above. Indonesia must be able to accurately estimate the impact of changes in the strategic environment at least within the next five to ten years to its national security.



Sumber: <https://tni.mil.id>



diambil; dan (3) mengaplikasikan instrumen tertentu untuk mendukung keputusan yang telah diambil. Tiga tindakan di atas adalah sebuah strategi untuk menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.

Tindakan-tindakan Indonesia, apakah itu berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternalnya, diambil berdasarkan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Makna yang tersirat dan inheren dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*). Menurut Hans. J. Morgenthau (1973) syarat minimum suatu negara adalah kemampuan untuk melindungi identitas fisik, politik dan budayanya dari gangguan negara lain.

Kalau konsep kepentingan nasional itu dikaji secara lebih mendalam, terutama yang menyangkut aspek mempertahankan identitas fisik, maka Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat seharusnya juga mempunyai tugas untuk mempertahankan integritas wilayahnya terhadap tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Upaya Indonesia untuk mempertahankan integritas wilayahnya antara lain dilakukan melalui pengembangan doktrin atau konsep-konsep pertahanan tertentu dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah dari waktu ke waktu.

Ini berarti bahwa setiap usaha membentuk negara dengan sendirinya mengandung pengertian kesediaan dan keharusan mempertahankan negara. Jadi, kalau pembangunan kekuatan pertahanan adalah untuk mempertahankan negara, maka adalah logis jika

This means that as an organized political entity and in designing strategies for coping with the impact of environmental change, Indonesia must take three important measures, namely: (1) take decisions with respect to changes in the external and internal environment; (2) mobilize resources to carry out the decision that has been taken; and (3) applying a specific instrument to support the decisions that have been taken. Three actions above is a strategy to cope with any situation that may occur in the future.

Indonesia's policy in the field of national security, whether it relates to the internal and external environment, should be based on national interests of the country. Meaning that implied and inherent in the concept of national interest is survival. According to Hans. J. Morgenthau (1973) the minimum requirements of a country's national security is the ability to protect the country's physical identity, politics and culture.

If the concept of national interest is to be studied in greater depth, especially concerning aspects of maintaining physical identity, then Indonesia as a sovereign state should also have a duty to defend its territorial integrity against the challenges, threats, and obstacles that come both from within and from outside the country. Indonesia's efforts to maintain its territorial integrity is to develop fresh doctrine or concepts in the area of defense.

This means that if the development of the defense force is to defend the country, it is logical that the force is also prepared to face any threat. Thus, Indonesia's national

kekuatan tersebut juga disiapkan untuk menghadapi setiap ancaman. Jadi, kepentingan nasional Indonesia adalah keamanan dan integritas wilayah (kelanjutan pembangunan nasional dan keutuhan kedaulatan).

Lebih dari itu, strategi keamanan (dan pertahanan) dalam dirinya mengandung arti kesiapan. Kesiapan sebagai wujud nyata dari sebuah strategi sangat diperlukan oleh Indonesia saat ini, khususnya ketika Indonesia menjadi bagian dari proses globalisasi, dalam mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan dan dampaknya terhadap pembangunan nasional Indonesia. Ini berarti kunci dari segala sesuatu yang hidup (termasuk negara) adalah aksi dan bahwa aksi tersebut diarahkan ke masa depan dan setiap negara mempunyai caranya sendiri untuk mengetahui apa yang akan terjadi atau bersikap antisipatif terhadap apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Dalam konteks ini, pandangan ke depan merupakan kondisi bagi kelangsungan suatu negara dan bahwa negara akan lenyap kecuali jika mereka dapat menyesuaikan diri dengan masa depan dan mampu menafsirkan lebih awal sinyal-sinyal yang ditimbulkan oleh masa depan tersebut. Hal ini juga berlaku untuk Indonesia. Artinya, karena perkembangan dan perubahan lingkungan strategis Indonesia masih akan berlangsung terus tanpa mengenal batas waktu dan kemungkinan dampaknya terhadap keamanan nasional, maka Indonesia dituntut melakukan apa yang oleh Daoed Joesoef (1991) disebut sebagai menerjemahkan perubahan menjadi sebuah prediksi dan kemudian menjadi suatu aksi. Jadi, desain baru strategi

interest is the security and territorial integrity (continuation of national development and sovereignty).

Moreover, the security strategy (and defense) in itself implies readiness. Readiness as a concrete manifestation of a strategy is required by Indonesia at this time, especially when Indonesia is part of the process of globalization and to anticipate the changes in the future and its impact on national development of Indonesia. This means the key for the security of the state is the policy action to address security issues which may occur in the future.

In this context, the survival of a country is important and that country will be in danger of collapsed if they cannot adapt to the future challenges and be able to interpret early signals generated by the future. This also applies to Indonesia. That is, because of developments and changes in the strategic environment of Indonesia will continue without and the possibility of the impact of the changes on national security, then Indonesian should, as Daoed Joesoef (1991) stated, translate such changes into some kind of a prediction before taking any real action. So, the new design of the Indonesian national security strategy is not only seen as a product of political action, but also a manifestation of the country's readiness to take new problems of national security.

BUILDING SECURITY BELT

Indonesia's strategic environment, internal and external, will continue to change and these changes will have an impact on some or all aspects of life of the country.





keamanan nasional Indonesia bukan hanya dipandang sebagai sebuah produk dari perbuatan politis, tetapi juga manifestasi kesiapan negara untuk mengatasi masalah-masalah baru keamanan negara.

MEMBANGUN SABUK KEAMANAN

Lingkungan strategis Indonesia, di dalam negeri maupun luar negeri, masih akan terus berubah dan perubahan-perubahan itu akan memberi dampak pada sebagian atau seluruh sendi-sendi kehidupan negara. Seperti dikatakan di atas, salah satu bidang kehidupan yang akan merasakan dampaknya adalah bidang keamanan negara. Karena itu kebijakan Indonesia dalam masalah ini kini dan di masa mendatang haruslah sebuah kebijakan yang mampu mengatasi setiap tingkatan dari ancaman maupun kerawanan yang mungkin muncul akibat perubahan-perubahan lingkungan tersebut.

Telah dikatakan di atas bahwa suatu negara telah dikatakan siap menghadapi perubahan-perubahan dan perkembangan lingkungannya apabila negara itu telah mengadopsi suatu kebijakan yang tidak hanya beorientasi ke depan, tetapi juga mampu mengantisipasi dan memperkirakan kejadian-kejadian di masa depan. Karena lingkungan strategis Indonesia masih akan berubah dan karena Indonesia sendiri tidak bisa menghindarkan diri dari perubahan-perubahan itu, maka ia tetap harus mempola sebuah strategi keamanan nasional untuk mengatasi dampak dari perubahan-perubahan itu

Dampak perubahan lingkungan strategis lima hingga sepuluh tahun mendatang terhadap stabilitas

As noted above, one of the areas of national life that will feel the impact most is the area of national security. Indonesian policy on this issue now and in the future must be a policy that is able to overcome all levels of threats and vulnerabilities that may rise due to the changes in the environment.

It has been said above that a country is to be said to be ready to face the changes and development of the environment if the country has adopted a policy that not only future-oriented, but also able to anticipate and predict events in the future. Because the Indonesian strategic environment will change and because Indonesia alone cannot shy away from these changes, the pattern of national security strategy should be able to address the impact of these changes.

The impact of changes in the strategic environment in the next five to ten years to the stability and national security remains to be anticipated and expected, for example by adopting a new strategy that is not contrary to the laws that regulate the security issues and in accordance with the changing of times.

Theoretically, the strategy includes the following steps. First, formulate the types of actions that will be implemented to deal with a variety of conditions caused by environmental changes. This phase is known as an intellectual act, because this process involves the ability to think and use of certain theories. Second, decide which actions is best to address the changes.

The selected action must be an action that is capable of



dan keamanan nasional tetap harus diantisipasi dan diperkirakan, misalnya dengan mengadopsi strategi baru yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur masalah keamanan dan sesuai dengan perubahan jaman.

Secara teoritik, strategi tersebut mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, merumuskan jenis-jenis aksi yang akan dijalankan untuk menghadapi berbagai macam kondisi yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan. Tahap ini disebut sebagai perbuatan intelektual, karena proses ini melibatkan kemampuan berfikir dan penggunaan teori-teori tertentu. Kedua, memutuskan aksi mana di antara sekian banyak aksi yang telah dirumuskan. Aksi yang dipilih haruslah sebuah aksi yang mampu berfungsi sebagai daya tangkal terhadap dampak-dampak negatif. Ketiga, melaksanakan aksi yang telah diputuskan dengan memobilisir seluruh potensi nasional. Sasaran tahap ini adalah mewujudkan kehendak politik dari para perumusannya. Jadi, intinya adalah bahwa sekalipun telah ada rencana-rencana strategi misalnya strategi khusus yang tangguh dan koheren masih diperlukan untuk menghadapi dampak perubahan lingkungan seperti digambarkan di atas.

Kalau dilihat dari tahap pertama (perumusan) dan dikaitkan dengan lingkungan strategis, maka dapat dirumuskan beberapa aksi, yaitu: (1) memobilisir komponen utama dan pendukung kamanan sehingga mampu berfungsi sebagai "sabuk pengaman" pembangunan nasional secara keseluruhan; (2) menjadikan industri-industri strategis sebagai pilar pembangunan keamanan

functioning as a deterrent power against negative impacts. Third, implement the decision by mobilizing the entire national potentials. The target of this stage is to realize the political will of the decision makers. So, the point is that even though there have been strategic plans for example, specific strategies which are robust and coherent are still needed to deal with the impact of environmental changes as described above.

When viewed from the first stage (formulation stage) and if it is associated with the strategic environment, some actions are necessary: (1) mobilize the national potential to secure the main security component so as to serve as a "safety belt" of overall national development; (2) develop strategic industries as pillars of national security so as to make the implementation of the development of defense and security become more effective and productive; (3) the need for the strategic industries to adopt new technology that is able to perform early warning function against the possibility of the threat emanating from the centers of vulnerability; (4) establish national center which serve as chain of centers of national defense; and (5) to secure access to resources abroad which are believed to be potential sources for the construction and development of the field of defense and security of Indonesia. These actions can be short-term, medium and long term oriented. That is, the development of defense and security is implemented in accordance with the direction and long-term development strategy and the development itself should have the ability to anticipate and make predictions.

As for the second phase (decision phase) and if it is

nasional sehingga mampu membuat penyelenggaraan pembangunan pertahanan dan keamanan menjadi lebih efektif dan produktif; (3) perlunya industri strategis mengadopsi jenis teknologi yang mampu melakukan pengideraan dini terhadap kemungkinan munculnya ancaman yang berasal dari pusat-pusat kerawan; (4) menebar pusat-pusat kemajuan dan pusat-pusat ketahanan nasional sehingga terbentuk mata rantai pusat-pusat ketahanan nasional; dan (5) mengamankan akses ke sumber-sumber di luar negeri yang diyakini sebagai sumber potensial bagi pembangunan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan Indonesia. Aksi-aksi ini dapat berorientasi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Artinya, pembangunan pertahanan keamanan dilaksanakan sesuai dengan arah dan strategi Pembangunan Jangka Panjang dan pembangunan itu sendiri dalam dirinya harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan membuat perkiraan-perkiraan.

Dikaitkan dengan tahap pemutusan (tahap kedua) dan jika dikaitkan dengan kemungkinan penebaran kapabilitas militer yang tidak terkontrol terhadap negara-negara di sekitar Indonesia dan munculnya isu-isu baru keamanan, seperti terorisme, penyelundupan manusia dan sebagainya, maka aksi yang memadai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal itu adalah memobilisir komponen utama dan pendukung pertahanan dan keamanan, terutama sekali mengarahkan pengembangan industri strategis pada penemuan-penemuan teknologi baru yang mampu melakukan penginderaan secara awal terhadap ancaman.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa industri strategis harus didayagunakan semaksimal mungkin sehingga mampu mengantisipasi "kejutan-kejutan" yang berasal dari lingkungan, baik domestik maupun internasional, dan berdampak langsung pada pertahanan keamanan Indonesia. Aksi tersebut dapat dilaksanakan (tahap ketiga) dengan mengerahkan seluruh unsur-unsur teknis yang profesional, dan yang paling utama adalah kiat (*operational art*) untuk menggunakan seluruh komponen untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi, inti strategi keamanan nasional adalah: (1) berorientasi ke depan; (2) mempunyai kemampuan mengantisipasi; dan (3) mempunyai kemampuan untuk membuat perkiraan-perkiraan. Tetapi harus diingat bahwa strategi yang memiliki sifat demikian ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk meniadakan hal-hal yang diperkirakan akan terjadi, tetapi berusaha menekan sekecil mungkin kemungkinan dampak buruknya. Dengan perkataan lain, bangsa Indonesia akan menerima apa pun kejadian yang timbul sebagai sebuah fakta, tetapi ia tetap harus berusaha mencegah atau menolak fatalitas yang diakibatkannya.

Singkatnya, upaya membangun keamanan nasional tidak cukup hanya mengandalkan pada sumber-sumber di dalam negeri. Hubungan luar negeri Indonesia juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Kemampuan dan keberhasilan Indonesia untuk menghadapi dan mengatasi dampak pertahanan dan keamanan dari perubahan-perubahan lingkungan yang begitu cepat pada akhirnya juga sangat tergantung pada kemampuan Indonesia sendiri dalam mengelola hubungan luar negerinya.***



associated with the possibility of spreading uncontrolled military capabilities of the countries around Indonesia and the emergence of new issues of security, such as terrorism, people smuggling and so on, then the appropriate action to anticipate the emergence of such security is to mobilizing national potentials to support national defense and security. It is therefore important that the country develop new technology – based strategic industries to be able to anticipate future threats to national security .

In short it can be said that the strategic industries should be utilized as much as possible so as to anticipate the "surprises" that comes from the environment, both domestically and internationally, and have a direct impact on Indonesian security defense. The action can be executed (the third stage) to mobilize all elements of professional technical and foremost is the issue (*operational art*) to use all the components to achieve the goals that have been decided.

Thus, the core national security strategy are: (1) future oriented; (2) has the ability to anticipate; and (3) has the ability predict. But it must be remembered that such a strategy is in no way intended to nullify the things that are expected to occur, but trying to minimizing the possibility of adverse effects. In other words, the Indonesian will accept any incidents arising as a fact, but it still must try to avoid or reject the resulting fatality.

In short, efforts to build a national security is not sufficient to rely solely on the resources in the country. Indonesia's foreign relations can also be used for that purpose. The ability and success of Indonesia to face and overcome the immediate defense and the security impacts of environmental changes in the end is also very dependent on the ability of Indonesia itself in managing its foreign relations.***

TINGKAT KEDAMAIAN DUNIA

GLOBAL PEACE INDEX

Oleh: Herry Darwanto

Staf Ahli Menteri Pertahanan bidang Ekonomi

Umat manusia saat ini hidup pada abad yang paling damai dalam sejarah; namun Indeks Kedamaian Dunia terbaru menunjukkan bahwa selama tujuh tahun terakhir ini telah terjadi sedikit penurunan dalam tingkat kedamaian dunia. *Global Peace Index 2014* yang diterbitkan oleh *Institute for Economy and Peace* (IEP) memeringkat 162 negara yang meliputi 99,6% dari seluruh jumlah penduduk dunia berdasarkan tingkat kedamaiannya.

Indeks Kedamaian Dunia selanjutnya disingkat IKD ini menggunakan tiga kriteria utama yaitu: keselamatan dan keamanan, konflik internal dan eksternal, dan kemampuan militer. Dari tiga kriteria ini kemudian diturunkan 22 indikator terkait dengan kedamaian, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1. Data yang digunakan untuk menghitung diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti *International Institute of Strategic Studies*, Bank Dunia, berbagai organisasi PBB, berbagai lembaga perdamaian, dan *Economic Intelligent Unit*. IKD dipuji keberadaannya oleh berbagai tokoh dunia seperti Kofi Annan, Dalai Lama, Desmond Tutu, Martti Ahtisaari, Muhammad Yunus, Jeffrey Sachs, dan Jimmy Carter. Adapun kritik terhadap IKD antara lain tidak dimasukkannya kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. IKD digunakan oleh banyak pemerintah, LSM, lembaga internasional seperti Bank Dunia, OECD, PBB, dan lain-lain.

TINGKAT KEDAMAIAN DUNIA 2013

Dari survei IEP dapat disimpulkan bahwa dewasa ini terdapat 22 negara yang termasuk dalam kelompok negara dengan tingkat kedamaian "sangat tinggi", 59 negara dalam kelompok negara dengan tingkat kedamaian

At present, mankind lives the most peaceful century in history. However, the most recent Global Peace Index shows that during the last seven years, there was a slight decrease in the world peace index. The Global Peace Index 2014, published by the Institute for Economy and Peace (IEP), ranked 162 countries, covering 99.6% of the world population based on the peace index.

The Global Peace Index (referred to as GPI) used three main criteria: safety and security, internal and external conflicts, and military capability. Out of the three criteria, 22 peace-related indicators were taken as shown in Table 1. The data used to calculate was obtained from various official sources, such as the International Institute of Strategic Studies, the World Bank, a variety of the UN organizations, a variety of peace institutions, and the Economic Intelligent Unit. GPI's existence received compliments from a number of world figures, including Kofi Annan, Dalai Lama, Desmond Tutu, Martti Ahtisaari, Muhammad Yunus, Jeffrey Sachs, and Jimmy Carter. On the other, GPI was also criticized for not putting in violence towards women and children. GPI was used by many governments, NGOs, international institutions

such as the World Bank, OECD, the United Nations, and so on.

WORLD PEACE INDEX 2013

Based on the GPI survey, it can be concluded that there are currently 22 countries, which are included in the group

Tabel 1. Indikator Indeks Kedamaian Dunia

	INDIKATOR	BOBOT	KRITERIA
A	Kedamaian Internal (60%)		
1	Persepsi publik tentang kriminalitas	3	keamanan
2	Jumlah petugas keamanan internal dan polisi	3	keamanan
3	Jumlah kasus pembunuhan	4	keamanan
4	Jumlah penduduk yang dipenjara	3	keamanan
5	Akses terhadap senjata kecil dan senjata ringan	3	kemampuan militer
6	Tingkat konflik terorganisir (internal)	5	konflik
7	Kejadian demonstrasi dengan kekerasan	3	keamanan
8	Tingkat kejahatan dengan kekerasan	4	keamanan
9	Ketidakstabilan politik	4	keamanan
10	Skala kekerasan kegiatan politik	4	keamanan
11	Impor senjata konvensional	2	kemampuan militer
12	Kegiatan terorisisme	2	keamanan
13	Jumlah kematian akibat konflik terorganisir (internal)	5	konflik
B	Kedamaian Eksternal (40%)		
1	Anggaran militer sebagai persentase dari PDB	2	kemampuan militer
2	Jumlah personel angkatan bersenjata	2	kemampuan militer
3	Kontribusi finansial untuk misi penjaga perdamaian PBB	2	kemampuan militer
4	Kepemilikan senjata berat dan nuklir	3	kemampuan militer
5	Ekspor senjata konvensional utama	3	kemampuan militer
6	Jumlah pengungsi sebagai persentase dari penduduk	4	keamanan
7	Hubungan dengan negara-negara tetangga	5	konflik
8	Jumlah konflik eksternal dan internal yang diatasi	5	konflik
9	Jumlah kematian akibat konflik eksternal terorganisir	5	konflik

Sumber: *Global Peace Index 2014*

“tinggi”, 56 negara dengan tingkat kedamaian “sedang”, 14 negara dengan tingkat kedamaian “rendah”, dan 11 negara dengan tingkat kedamaian “sangat rendah”.

Icelandia adalah negara terdamai di dunia saat ini, disusul oleh Denmark dan Austria. Negara-negara Eropa lainnya menempati peringkat atas dalam tingkat kedamaianya, hal ini menjadikan Eropa sebagai wilayah yang paling damai di dunia. Setelah Eropa, bagian dunia yang juga relatif damai adalah Amerika Utara, kemudian Asia Pasifik. Sedangkan bagian dunia yang paling kurang damai adalah Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Utara, dan negara-negara Eropa Tengah termasuk Rusia. Ke sebelas negara dengan tingkat kedamaian “sangat rendah” di dunia adalah: Suriah, Afghanistan, Sudan Selatan, Irak, Somalia, Sudan, Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Pakistan, Korea Utara dan Rusia.

Indonesia berada pada urutan ke-54 dalam urutan tingkat kedamaian dunia. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, Indonesia menempati urutan kelima dari sepuluh negara, yaitu setelah Singapura (25), Malaysia (33), Laos (38), dan Vietnam (45). Di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik, tiga negara yaitu Singapura, Malaysia dan Filipina mengalami penurunan peringkat dalam indeks kedamaian dunia yang cukup besar. (Lihat Tabel 2). Dalam hal Singapura, penyebabnya adalah meningkatnya ketidakamanan internal, menurunnya jumlah polisi per kapita, dan meningkatnya kriminalitas. Malaysia mengalami peningkatan dalam kegiatan terorisme dan ketidakstabilan politik. Filipina menghadapi ketegangan dengan negara lain yaitu sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Ketiga negara ASEAN ini juga tercatat sedang membangun kemampuan nuklir dan senjata beratnya, sejalan dengan kecenderungan umum ke arah modernisasi angkatan bersenjata di wilayah ini. Indonesia tidak mengalami perubahan peringkat dari posisi tahun sebelumnya. Tingkat kedamaian Indonesia dipengaruhi oleh intensitas yang tinggi dalam kejahatan dengan kekerasan, persepsi publik tentang kriminalitas, demonstrasi dengan kekerasan, skala kekerasan kegiatan politik, dan kegiatan terorisme.

Negara-negara Indocina dan Korea Utara berada pada urutan lebih bawah diantara negara-negara Asia Pasifik dalam peringkat kedamaian dunia. Sebaliknya, negara-negara yang lebih maju secara ekonomi, seperti Selandia Baru, Jepang, Australia, Singapura dan Taiwan; merupakan negara-negara dengan indeks kedamaian

of countries with “very high” peace level, 59 countries with “high” peace level, 56 countries with “moderate” peace level, 14 countries with “low” peace level, and 11 countries with “very low” peace level.

Iceland is at present the most peaceful country in the world, followed by Denmark and Austria. Other European countries rank high in the world level, making Europe the most peaceful region in the world. After Europe, the other relatively-peaceful part of the world includes North America and Asia Pacific. The least peaceful part of the world includes South Asia, the Middle East, and North Africa, as well as Central Europe, including Russia. The 11 countries with “very low” peace level, include Syria, Afghanistan, South Sudan, Iraq, Somalia, Central Africa, Democratic Republic of Congo, Pakistan, North Korea, and Russia.

Indonesia ranked 54 on the world peace index. Compared to other ASEAN countries, Indonesia placed 5th position out of ten countries, after Singapore (25), Malaysia (33), Laos (38), and Vietnam (45). Amongst countries in the Asia Pacific region, three countries, including Singapore, Malaysia, and the Philippines underwent a significant decrease in the world peace index. (See Table 2). For Singapore, the cause was the increasing internal insecurity, the decreasing number of policemen per capita, and the increasing number of crimes. Malaysia underwent an increase in terrorism activities and political instability. The Philippines faced tension with another country due to the South China Sea conflict. These three ASEAN countries were also recorded in the development of their nuclear and heavy weapon capability, in line with the general tendency towards the region’s armed forces modernization.

Indonesia’s rank did not change from the previous year. The country’s peace level was affected by the high intensity of crimes with violence, public perception on crimes, demonstrations with violence, and the scale of violence in political activities and terrorism.

Indochina and North Korea placed the lowest rank amongst Asia Pacific countries in the global peace index. On the contrary, economically-more advanced countries, such as New Zealand, Japan, Australia, Singapore and Taiwan were countries with the highest peace index, two of them were even the world’s ten

most peaceful countries (New Zealand and Japan).

In the North American region, Uruguay (29) placed

Tabel 2. Indeks Kedamaian Dunia Negara-Negara ASEAN

	NEGARA	IKD 2014*	PERUBAHAN PERINGKAT 2013-2014**
1	Singapura	25	-9
2	Malaysia	33	-4
3	Laos	38	1
4	Vietnam	45	-4
5	Indonesia	54	0
6	Timor-Leste	69	-18
7	Kamboja	106	9
8	Thailand	126	4
9	Filipina	134	-5
10	Myanmar	136	4

IKD: Indeks Kedamaian Dunia (Global Peace Index)

* Angka semakin kecil - tingkat kedamaian semakin baik

** Angka semakin besar - perubahan semakin baik

Sumber: Global Peace Index 2013 dan 2014

tertinggi, bahkan dua diantaranya termasuk dalam sepuluh negara terdamai di dunia (Selandia Baru dan Jepang).

Di kawasan Amerika Selatan, Uruguay (29) menempati peringkat teratas, disusul Chili (30) dan Argentina (43). Brazil berada pada peringkat ke-(91), sedang Kolombia menempati peringkat terbawah (150). Di kawasan Amerika Tengah, negara-negara paling damai adalah Kosta Rika, Panama dan Nikaragua; sedangkan Honduras dan Meksiko termasuk negara-negara yang kurang damai, masing-masing pada peringkat ke-(117 dan ke-138). Kuba, negara sosialis terkemuka, berada pada peringkat ke-(75).

Diantara negara-negara Asia Selatan, Bhutan menempati urutan teratas (16), jauh di atas negara peringkat berikutnya yaitu Nepal (76). India dan Pakistan yang masih sering bertikai berada pada urutan ke-(143 dan ke-154). Sedangkan negara paling kurang damai di kawasan ini adalah Afghanistan (161). Di antara negara-negara Eropa Tengah, Moldova (71) berada pada urutan teratas, negara-negara lain berada jauh di bawah peringkat Moldova, termasuk Rusia (152) yang menempati urutan terbawah. Secara keseluruhan, negara-negara Eropa Tengah relatif kurang damai dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain.

Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, negara teratas dalam tingkat kedamaian dunia adalah Qatar (22), disusul Kuwait (37) dan Uni Emirat Arab (40). Menempati urutan terbawah adalah Suriah (162), Irak (159), dan Sudan (157). Selanjutnya di kawasan Sub-Sahara Afrika, negara teratas dalam tingkat kedamaian dunia adalah Mauritius (24), Botswana (38) dan Zambia (44). Sedangkan negara-negara terbawah dalam tingkat kedamaian di kawasan ini adalah Sudan Selatan (160), Somalia (158), dan Afrika Tengah (156).

Bagaimana dengan negara-negara terkaya di dunia? Amerika Serikat menunjukkan tingkat kedamaian yang rendah (101), demikian pula China (108), Afrika Selatan (122), Turki (128), Meksiko (138), India (143) dan Rusia (152). Tingkat kedamaian yang rendah untuk Amerika Serikat disebabkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah untuk penguatan militer, konflik internal dan eksternal yang ditangani, dan banyaknya jumlah narapidana. Tingkat kedamaian terbaik diantara negara-negara G-20 adalah Kanada (7), disusul Jepang (8), Australia (15), Jerman (17), dan Italia (34). Tingkat kedamaian Indonesia (54) relatif sama dengan beberapa negara yang maju seperti Inggris (47), Perancis (48), dan Korea Selatan (52). Indonesia lebih damai daripada Arab Saudi (80) dan Brazil (91). Diantara ke 19 negara G-20 (satu anggota G-20 lain adalah Uni Eropa), Argentina dan Arab Saudi mengalami kenaikan tingkat kedamaian yang besar, yaitu 17 peringkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan negara-negara yang mengalami kemunduran tingkat kedamaian cukup besar adalah Brazil dan China. (Lihat Tabel 3)

the top, followed by Chile (30) and Argentina (43). Brazil was (91st), while Colombia placed the lowest (150th). In Central America, the most peaceful countries included Costa Rica, Panama and Nicaragua. Honduras and Mexico were categorized less peaceful, respectively in (117th) and (138th) position. Cuba, the re-known socialist country, was at (75th).

Amongst the South Asian countries, Bhutan was on top (16th), far above the following countries, that is Nepal (76). Two frequently-conflicting countries, India and Pakistan, were at (143rd and 154th). The least peaceful country in the region was Afghanistan (161st). Amongst Central European countries, Moldova was placed the highest at (71st). Other countries were far below Moldova's rank, including Russia (152nd), which was the lowest. Overall, Central European countries were relatively less peaceful compared to other European countries.

In the Middle East and North Africa, the highest-ranked countries in the global peace index were Qatar (22), followed by Kuwait (37) and the United Arab Emirates (40). In the African Sub-Sahara region, the most peaceful countries were Mauritius (24), Botswana (38) and Zambia (44). The lowest-ranked countries in the region included South Sudan (160), Somalia (158) and Central Africa (156).

What about the world's richest countries? The United States showed a low peace index (101), so did China (108), South Africa (122), Turkey (128), Mexico (138), India (143), and Russia (152). The low level of peace in the United States was caused by the government's large expense for military strengthening, internal and external conflicts handled, and the large number of prisoners. The highest peace level amongst G-20 countries were Canada (7), followed by Japan (8), Australia (15), Germany (17), and Italy (34). Indonesia's peace level (54) was relatively the same with some developed countries, such as the Great Britain (47), France (48), and South Korea (52). Indonesia was more peaceful than Saudi Arabia (80) and Brazil (91). Amongst the 19 countries of G-20 (the other G-20 member is the European Union), Argentina and Saudi Arabia got a significant increase in the peace rank, that was 17 levels from the previous year. Countries that underwent a significant setback in peace level were Brazil and China. (See Table 3)

PEACE TREND 2008-2013

Comparing the GPI since 2008, it can be seen that there were 111 countries that underwent a decrease in the peace level, while only 51 countries showed an increase. Europe maintained its position as the most peaceful region during the last seven years, with 14 out of 20 countries were categorized the most peaceful countries. Since 2008, only four out of 22 indicators that showed improvement, the other 18 indicators deteriorated. It indicates that the global

TREN PERDAMAIAN 2008-2013

Membandingkan IKD sejak 2008, terlihat bahwa ada 111 negara yang mengalami penurunan dalam tingkat kedamaian, sementara hanya 51 negara yang menunjukkan peningkatan. Eropa mempertahankan posisinya sebagai wilayah yang paling damai selama tujuh tahun terakhir, dengan 14 dari 20 negara termasuk negara yang paling damai. Sejak tahun 2008 hanya empat dari 22 indikator yang menunjukkan perbaikan, 18 lainnya memburuk. Hal ini mengindikasikan dunia sedikit menurun dalam tingkat kedamaianya selama tujuh tahun terakhir. Penurunan indeks kedamaian global selama 2008-2013 terutama didorong oleh meningkatnya aktivitas teroris, meningkatnya impor dan ekspor senjata, meningkatnya jumlah kasus pembunuhan.

Negara-negara yang mengalami perbaikan dalam tingkat kedamaian antara 2012-2013 adalah Georgia, Pantai Gading, Burundi, Slovakia, dan Uzbekistan. Georgia adalah contoh fenomenal, naik 28 tingkat dari peringkat ke-(139) pada tahun 2012 menjadi peringkat ke-(111) pada tahun 2013, sejalan dengan usainya konflik dengan Rusia beberapa tahun sebelumnya. Adapun negara-negara yang mengalami penurunan peringkat kedamaian adalah Ukraina, Mesir, Kazakhstan, dan Mozambik. Negara-negara tersebut mengalami pergolakan politik (eksternal atau internal) yang melibatkan kekerasan sehingga menurunkan tingkat kedamaianya.

Penurunan kedamaian global pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh penurunan dalam empat indikator yaitu terorisme, konflik yang diatasi, jumlah pengungsi dan kematian akibat konflik internal yang terorganisir. Mengimbangi penurunan tingkat kedamaian ini adalah perbaikan pada empat indikator lain yaitu teror politik, kasus pembunuhan, kematian akibat konflik eksternal terorganisir, dan jumlah personel militer. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi kedamaian dunia beralih dari permusuhan “antar negara” menjadi konflik “intra negara”.

Kondisi kedamaian dunia beberapa tahun terakhir ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro seperti krisis finansial global, gerakan demokrasi di negara-negara Arab (*Arab Spring*), dan terorisme. Karena faktor-faktor ini masih ada bahkan menguat, tingkat kedamaian dunia mungkin masih belum menunjukkan perbaikan. IEP memperkirakan sepuluh negara yang diduga akan mengalami penurunan tingkat kedamaian terbesar pada satu-dua tahun ke depan, yaitu: Zambia, Haiti, Argentina, Chad, Bosnia dan Herzegovina, Nepal, Burundi, Georgia, Liberia dan Qatar. Negara-negara ini terletak di berbagai belahan dunia, mengadopsi berbagai bentuk pemerintahan (diluar sistem demokrasi penuh), dan berpenghasilan rendah hingga tinggi.

DAMPAK KONFLIK

Hubungan antara konflik dengan kemakmuran

Tabel 3. Indeks Kedamaian Dunia Negara-Negara G-20

	NEGARA	IKD 2014*	PERUBAHAN PERINGKAT 2013-2014**
1	Kanada	7	1
2	Jepang	8	-2
3	Australia	15	1
4	Jerman	17	-2
5	Italia	34	1
6	Argentina	43	17
7	Inggris	47	-3
8	Perancis	48	5
9	Korea Selatan	52	-5
10	Indonesia	54	0
11	Arab Saudi	80	17
12	Brazil	91	-10
13	Amerika Serikat	101	-2
14	China	108	-7
15	Afrika Selatan	122	-1
16	Turki	128	6
17	Meksiko	138	-5
18	India	143	-2
19	Rusia	152	3

IKD: Indeks Kedamaian Dunia (*Global Peace Index*)

* Angka semakin kecil - tingkat kedamaian semakin baik

** Angka semakin besar - perubahan semakin baik

Sumber: *Global Peace Index 2013 dan 2014*

peace slightly decreased during the last seven years. The decrease in the global peace index during 2008 – 2013 was mainly caused by the increasing number of terrorism activities, the increasing weapons import and export, and the increasing number of murder cases.

Countries that improved in the global peace index from 2012 – 2013, were Georgia, the Ivory Coast, Burundi, Slovak, and Uzbekistan. Georgia was a phenomenal example, which raised 28 levels from (139th) position in 2012 to (111th) position in 2013, in line with the settled conflict with Russia some years earlier. Countries that deteriorated in the global peace index included Ukraine, Egypt, Kazakhstan, and Mozambique. These countries underwent political upheavals (both external as well as internal), which involved violence so that the peace index decreased.

The deteriorated global peace index in 2013 was mainly caused by the decrease in four indicators: terrorism, solved conflicts, the number of refugees, and the deaths caused by organized internal conflicts. To balance the decrease in the peace index, four other indicators were improved, including political terrors, murder cases, deaths caused by organized external conflicts, and the number of military personnel. In general, it can be said that the global peace condition has been transferred from “amongst countries” to “intra countries”.

During the last few years, the global peace condition

ekonomi dapat diketahui manakala negara mengalami konflik atau perang sipil. Contoh-contoh yang menonjol adalah Nikaragua yang mengalami masa revolusi selama 1950 hingga 1990-an, perang saudara di El Salvador 1979-1991, dan perang belum lama ini di Afghanistan dan Irak. Ketiga negara ini menunjukkan kemunduran ekonomi yang cukup parah. Pada kasus Sierra Leone, ketiadaan perdamaian telah mengakibatkan kerugian besar dalam bentuk hilangnya nyawa dan kemunduran ekonomi. Perang Sipil Sierra Leone berlangsung selama 11 tahun, dimulai pada tahun 1991 dan berakhir pada tahun 2002. Meskipun akhir perang memungkinkan ekonomi tumbuh kembali, namun pada tahun 2010 tingkat PDB per kapita masih 31 persen lebih rendah dari tingkat yang diperkirakan jika tidak ada konflik. Dampak ekonomi negatif dari konflik di Sierra Leone juga dicerminkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (Bank Dunia) yang lebih rendah dibandingkan rata-rata negara tetangganya yang kemudian meningkat setelah berhentinya konflik.

Meskipun contoh-contoh tersebut menggarisbawahi dampak ekonomi dan pembangunan manusia akibat kekerasan, manfaat adanya perdamaian melampaui manfaat ketiadaan kekerasan. Artinya, perdamaian bukan hanya tidak adanya kekerasan, tetapi menumbuhkan sikap, kelembagaan dan struktur yang bersama-sama memperkuat ketahanan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih baik. Mendorong perdamaian melalui pembangunan faktor-faktor sosial politik yang menopang perdamaian akan mengurangi biaya untuk penanganan kekerasan sekaligus mendorong pengembangan potensi kemanusiaan.

Besarnya dampak ekonomi kekerasan berhubungan erat dengan rendahnya tingkat kedamaian. Bagian dari produk domestik bruto suatu negara yang digunakan untuk membiayai penanganan kekerasan cenderung meningkat sejalan dengan memburuknya tingkat kedamaian suatu negara. Biaya penanganan kekerasan adalah biaya

was affected by macro factors, such as the global financial crisis, the democracy movements in Arab countries, and terrorism. Due to these existing and even strengthening factors, the global peace condition has not shown any improvement. GPI has predicted that ten countries assumed to undergo a decrease in the peace index in the next one – two years, include Zambia, Haiti, Argentina, Chad, Bosnia and Herzegovina, Nepal, Burundi, Georgia, Liberia and Qatar. These countries are located in many parts of the world, adopting various forms of government (outside the full democracy system) and have low to high income.

CONFLICT IMPACTS

Relations between a conflict and economic welfare can be seen when a country experiences a conflict or a civil war. Prominent examples are Nicaragua, which underwent a revolution from 1950 to 1990s, the civil war in El Salvador from 1979-1991, and the recent wars in Afghanistan and Iraq. These three countries experienced a fairly bad economic setback. In the Sierra Leone case, the absence of peace resulted in a major loss of lives and an economic setback. The civil war in Sierra Leone last for 11 years, which started in 1991 and ended in 2002. Despite an economic re-growth following the end of the war, in 2010, the GDP per capita remained 31% lower than the predicted level if there had been no war. The negative economic impact in Sierra Leone was also expressed by the Human Development Index (the World Bank), which was lower than the average index of the neighboring countries, which experienced an increase following the end of the conflicts.

Although the examples underline the economic impacts and human development due to violence, the benefits of peace exceed the benefits of the absence of violence. It means that peace is not just the absence of violence, but also grows attitude, institutions and structures,

which jointly strengthen the economic resilience and better human development. Encouraging peace through development of social political factors, which support peace, will reduce the cost to handle violence and encourage development of the human potentials.

The economic impacts of violence are closely related to the low level of peace. A part of a country's GDP, which is used to finance the violence handling, tends to increase in line with the worsening peace index of a country. The cost to handle violence is the expenditure by people or a country to prevent violence and overcome the violence impacts.

To calculate the cost of violence handling, IPE uses 10 indicators from GPI and other three expenditure indicators, including the number of deaths caused by internal and external conflicts, the number of crimes with



yang dikeluarkan suatu masyarakat atau negara untuk melaksanakan pencegahan kekerasan dan mengatasi dampak akibat kekerasan.

Dalam menghitung biaya penanganan kekerasan, IPE menggunakan sepuluh indikator dari IKD dan tiga indikator pengeluaran lain; yaitu jumlah kematian akibat konflik internal dan eksternal, tingkat kejahatan dengan kekerasan, belanja militer, jumlah pengungsi, jumlah pembunuhan, jumlah petugas keamanan, jumlah tahanan, jumlah tenaga keamanan swasta, biaya penanganan terorisme, biaya akibat konflik terhadap ekonomi, biaya ketakutan terhadap kekerasan, dan biaya pengiriman misi penjaga perdamaian PBB.

Dampak terhadap ekonomi dunia dari meningkatnya kekerasan pada tahun 2013 diperkirakan cukup signifikan, yaitu sebesar US\$ 9,8 triliun per tahun atau 11,3% dari PDB dunia. Jumlah ini setara dengan biaya sebesar US\$ 1.350 yang harus ditanggung oleh setiap orang di dunia. Kerugian global tahun 2013 ini meningkat US\$ 179 miliar dari tahun 2012, atau naik 3,8%. Meningkatnya dampak negatif ekonomi global akibat kerusuhan setara dengan 0,4% dari PDB global. Diperkirakan ada lebih dari 500 juta orang yang tinggal di 16 negara yang memiliki nilai risiko tinggi, sekitar 200 juta orang diantaranya hidup dengan uang Rp. 20.000 per hari saja, membuat mereka sangat rentan jika terjadi kerusuhan sosial.

DEMOKRASI DAN KEDAMAIAN

Indeks Kedamaian Dunia dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara kedamaian dengan bentuk kelembagaan negara. IPE meneliti dua puluh negara yang mempunyai hubungan kontras antara kelembagaan negara dan tingkat kedamaian berbeda. Ditemukan bahwa ada beberapa negara dengan lembaga demokrasi yang kuat namun tingkat kedamaian yang rendah (defisit kedamaian), dan ada pula beberapa negara dengan tingkat kedamaian tinggi namun tingkat demokrasinya rendah (defisit demokrasi). Negara-negara yang defisit demokrasi berada di Timur Tengah (Qatar, UAE, Oman, Kuwait, Yordania), dan di Asia Tenggara (Laos, Vietnam). Sedangkan negara-negara yang defisit kedamaian tersebar di lima benua, termasuk Amerika Serikat, Israel, Afrika Selatan, beberapa negara di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Sebagian besar negara lainnya menunjukkan tingkat kedamaian dan tingkat demokrasi yang seimbang, namun kebanyakan negara dengan demokrasi yang mapan menunjukkan tingkat kedamaian yang tinggi.

PENUTUP

Adalah benar pendapat Steve Killelea, pendiri IEP, bahwa “Karena situasi keamanan global memburuk, maka



violence, the military expenditure, the number of refugees, the number of murders, the number of security officers, the number of prisoners, the number of private security personnel, the cost of terrorism handling, the conflict-caused cost against the economy, the cost of fear against violence, and the cost of sending the UN peace-keeping mission.

The impacts to the world economy from the increasing violence in 2013 was predicted fairly significant, amounting to US\$ 9.8 trillion per year or 11.3% from the world’s GDP. The amount was equivalent to US\$1.350, which everyone in the world should bear. The global loss in 2013 increased US\$ 179 billion in 2012, or an increase of 3.8%. The increasing negative impact to the global economy caused by riots was equivalent to 0.4% of the global GDP. It is estimated that more than 500 million people, living in 16 countries, had high risks. Some 200 million amongst them lived with only IDR 20,000 per day, making them highly prone to social riots.

DEMOCRACY AND VIOLENCE

The Global Peace Index can be used to know relations between peace and the form of state institutions. IPE has studied 20 countries that have contrast relations between the state institutions and a different peace index. It was found out that there are some countries with strong democracy institutions yet with a low peace level (peace deficit). There are also some countries with a high peace level yet with a low democracy level (democracy deficit). Countries with democracy deficit are located in the Middle East (Qatar, UAE, Oman, Kuwait, Jordan) and in South East Asia (Laos, Vietnam). Countries with peace deficit are spread in five continents, including the United States, Israel, South Africa, some countries in Latin America and South East Asia. Most of other countries show a balanced peace and democracy level. However, most countries with settled democracy show a high peace index.

upaya menjaga perdamaian dunia harus dilakukan lebih efektif lagi. Perlu diperhatikan oleh pemerintah, lembaga pembangunan, dunia usaha dan masyarakat internasional bahwa pembangunan perdamaian adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan sosial." Menjadi tugas setiap pemerintahan, masyarakat, dan individu untuk memantau, menjaga, dan meningkatkan kedamaian di dunia agar terwujud kesejahteraan lahir dan batin yang lebih baik.

Indonesia sebagai negara besar perlu melakukan berbagai upaya agar menjadi negara yang lebih damai, dan paling damai diantara negara-negara ASEAN khususnya, dan Asia Pasifik pada umumnya. Beberapa hal yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih damai adalah kejahatan dengan kekerasan mulai dari tawuran antar pelajar hingga perkelahian antar kampung/desa serta tindakan main hakim sendiri perlu dicegah, proses demokratisasi yang masih berlangsung, khususnya terkait dengan meruncingnya perbedaan *platform* politik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, harus tidak menimbulkan konflik fisik di lapangan, aktivitas terorisme perlu terus diberantas mulai dari sumbernya, garis perbatasan dengan negara tetangga perlu ditetapkan untuk mengurangi konflik perbatasan yang masih sering terjadi, dan memperbanyak aparat keamanan di tengah-tengah masyarakat untuk menghadirkan suasana aman dan damai.***

CLOSING

Steve Killelea, IEP founder, was correct in his opinion, that "Due to the worsening global security situation, efforts to maintain the world peace must be executed more effectively. The governments, development institutions, business entities and the international society must pay attention that the peace development is a requirement for the economic and social development." It is the task of every government, people and individual to observe, maintain, and increase peace in the world to realize better material and immaterial welfare.

Indonesia as a vast country, must take various efforts to become a more peaceful country, even the most peaceful country amongst ASEAN countries in particular and the Asia Pacific countries in general. Some factors that can make Indonesia a more peaceful country, include prevention of crimes with violence, from brawls between school students and conflicts between villages as well as self-judgement; prevention of any physical conflict in the field in the democratization process, in particular with the sharpening differences between Koalisi Merah Putih and Koalisi Indonesia Hebat; eradication of terrorism activities starting from the source; and determination of the border line with neighboring countries to reduce more-frequent border conflicts; and finally, addition of security officers in public to present a safe and peaceful atmosphere.***



Sumber: Foto Ahmad Ibrahim

EXPO & FORUM INDO DEFENCE 2014 : “WORLD DEFENCE TECHNOLOGY IMPROVEMENT”

“WORLD DEFENCE TECHNOLOGY IMPROVEMENT” INDO DEFENCE 2014 EXPO & FORUM

Oleh: Tim Redaksi

Kementerian Pertahanan kembali menggelar pameran industri pertahanan berskala Internasional, *Indo Defence 2014 Expo & Forum*, dengan tema “*World Defence Technology Improvement*”. *Event* yang berlangsung dari tanggal 5 November sampai dengan 8 November 2014 di Jakarta *International Expo* (JIEXPO) Kemayoran Jakarta, dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Pameran *Indo Defence* adalah pameran produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang dilaksanakan setiap dua tahun. Kegiatan ini merupakan ajang promosi berbagai macam dan jenis produk industri pertahanan. Di samping itu, pameran ini juga merupakan media untuk menjalin kerjasama, baik antara pihak swasta dengan swasta maupun pemerintah dengan pemerintah. Kerja sama tersebut dapat berupa riset, pemasaran maupun produksi bersama.

Penyelenggaraan pameran *Indo Defence* seiring dengan era kebangkitan industri pertahanan dalam negeri yang terus diupayakan dan meyakini bahwa kebangkitan industri pertahanan akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang pada gilirannya akan membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi nasional. Dalam bidang teknologi, kebangkitan industri pertahanan akan mendorong penguasaan teknologi yang lebih canggih sehingga mampu bersaing dalam lingkup regional dan global.

Melalui kegiatan pameran seperti ini, diharapkan juga akan terjalin hubungan dan terbentuk jaringan usaha dalam industri pertahanan maupun dengan pihak terkait lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, kita mengharapkan para peserta pameran dapat saling membagi dan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap produk dan teknologi industri pertahanan di dunia termasuk produk-produk buatan Indonesia.

Pameran *Indo Defence* pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, dan kegiatan tahun ini merupakan *event Indo Defence* yang ke 6 (enam). Penyelenggara pameran ini adalah Kementerian Pertahanan, bekerjasama dengan PT. Napindo Media Ashatama. Kegiatan ini melibatkan berbagai perusahaan besar baik dari dalam maupun luar negeri. Pameran Indo Defence 2014 diikuti oleh 56 negara yang mengirimbkan delegasi resmi setingkat Menteri, Kepala Staf Angkatan, Sekjen dan Dirjen untuk menyaksikan pameran tersebut, termasuk negara-negara ASEAN. Negara-negara tersebut antara lain; Qatar,

The Ministry of Defense organized an international exhibition on defense industry, *Indo Defense 2014 Expo & Forum*, with a theme “*World Defense Technology Improvement*”. The event, held from November 5th to 8th, 2014, at the Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, was officially opened by Vice President of the Republic of Indonesia, Jusuf Kalla.

Indo Defense is a two-yearly exhibition on defense and security equipment. The event is a forum to promote types of the defense industry products. In addition, the exhibition is also a media to set up cooperation, with both the private sector as well as the government. The cooperation can be in research, marketing and joint production.

The *Indo Defense* exhibition is organized in line with the awakening era of the domestic defense industry, which continues to be strived and believed to boost the economic sectors that will in return result in positive impacts to development of the national economy. In terms of technology, the awakening of the defense industry will encourage the mastering of more sophisticated technology so that Indonesia will be competitive in both regional as well as global scopes.

Through such an exhibition, it is expected that relations and business networks in the defense industry and other related parties will be established. In a broader context, it is also hoped that the exhibition participants will share and obtain knowledge and understanding on the world's defense industry products and technology, including Indonesian products.

The *Indo Defense* exhibition was first held in 2004. This year's event was the sixth time. The organizer was the Ministry of Defense in cooperation with PT. Napindo Media Ashatama. It involved various large companies, both domestic as well as foreign companies. The *Indo Defense* exhibition 2014 was participated by 56 countries, which sent official delegations of Minister, Chief of Staff, Secretary General and Director General level, to see the exhibition. The countries included ASEAN countries, Qatar, Malaysia, Belarus Republic, Timor Leste, Japan, Serbia, Pakistan, Sweden, Portugal, Laos, Poland, the Philippines, Brazil, Vietnam, Czech Republic, Turkey, the Great Britain, France, Singapore, Brunei Darussalam, Korean Republic, India, Egypt, Australia, the United States, Iran, Cambodia, Russia dan Thailand. The event was one of the large-scaled exhibitions and has become an official



Malaysia, Republik Belarusia, Timor Leste, Jepang, Serbia, Pakistan, Swedia, Portugal, Laos, Polandia, Filipina, Laos, Polandia, Brazil, Vietnam, Republik Ceko, Turki, Inggris, Perancis, Singapura, Brunei Darussalam, Republik Korea, India, Mesir, Australia, Amerika Serikat, Iran, Kamboja, Rusia dan Thailand. *Event* ini sebagai salah satu pameran berskala besar dan telah menjadi agenda resmi Asosiasi Pelaksana Pameran Industri Pertahanan Internasional. Hal ini menjadi catatan prestasi bagi kita, karena pameran Indo Defence telah menjadi "ikon" kebanggaan bangsa Indonesia di dunia internasional dan diperkirakan kegiatan ini dikunjungi oleh sekitar 20.000 pengunjung dari dalam maupun luar negeri.

Indo Defence 2014 Expo & Forum diikuti oleh industri pertahanan dalam negeri milik pemerintah maupun swasta, instansi pemerintah, perguruan tinggi dan media. Industri pertahanan dalam negeri terkemuka yang mengikuti pameran ini antara lain PT. DI, PT. Pindad, PT. LEN, PT. Dok Koja Bahari, PT. INTI, PT. Krakatau Steel, PT. Industri Kapal Indonesia, PT. PAL, dan PT. Dahana, PT. Bhimasena, PT. CMI, PT. Maju Mapan, PT. Sari Bahari, PT. Garda Persada, T&E Simulation, PT. Farin Indonesia, PT. Palindo Marine, PT. Tesco Indomaritim dan sebagainya. Sedangkan instansi pemerintah akan turut berpartisipasi, antara lain Badan Keamanan Laut, Basarnas, BPPT, BNPP, LIPI, LAPAN, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian.

agenda of the Association of International defense Industry Event Organizers. It was an achievement for Indonesia as the Indo Defence exhibition has become an 'icon' in the international forum, of which Indonesia should be proud of. It is estimated that 20 thousand domestic and foreign people visited the exhibition.

Indo Defence 2014 Expo & Forum was participated by domestic defense industries of both the government as well as private companies, government institutions, universities, and media. Domestic re-known defense industries, taking part in the exhibition, included PT. DI, PT. Pindad, PT. LEN, PT. Dok Koja Bahari, PT. INTI, PT. Krakatau Steel, PT. Industri Kapal Indonesia, PT. PAL, and PT. Dahana, PT. Bhimasena, PT. CMI, PT. Maju Mapan, PT. Sari Bahari, PT. Garda Persada, T&E Simulation, PT. Farin Indonesia, PT. Palindo Marine, PT. Tesco Indomaritim, and so on. Participating government institutions included the Agency of Sea Security, the National Agency of Search and Rescue, the Agency for Assessment and Application of Technology (BPPT), the National Agency of Border Management (BNPP), the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), the Indonesian Armed Forces, the Indonesian Police, the Ministry of Transportation and the Ministry of Industry.

What made us proud of the organization of Indo

Hal yang membanggakan pada penyelenggaraan Indo Defence tahun 2014 ini adalah meningkatnya partisipasi dan keikutsertaan BUMN dan BUMS Nasional. Tercatat ada 9 (Sembilan) BUMN dan 158 BUMS Industri Pertahanan Nasional yang ikut ambil bagian pada event ini. Meningkatnya keikutsertaan tersebut merupakan hasil kerja keras serta bimbingan dan dorongan dari pemerintah melalui Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Hal ini menandakan bahwa industri pertahanan nasional telah dan sedang bergerak maju untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri terutama dalam pemenuhan kebutuhan Alat Sistem Pertahanan. Meski demikian, masih terdapat tantangan utama yang juga dihadapi dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan, diantaranya kemampuan sumber daya manusia. Untuk itu kedepannya perlu terus dipersiapkan sumber daya manusia pertahanan yang memiliki keunggulan dan kemampuan penguasaan teknologi. Karena riset di bidang alat peralatan pertahanan perlu ditingkatkan dan sangat penting.

Dalam pameran tersebut, Kementerian Pertahanan Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama industri pertahanan dengan Pemerintah Turki, yang akan menandai dimulainya kolaborasi pembangunan produk-produk peralatan pertahanan kedua negara pada masa mendatang. Melalui kegiatan *Indo Defence* ini, kerjasama yang telah terjalin baik selama ini khususnya di bidang pertahanan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat dapat terus berlanjut dan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Defense 2014 was the increasing participation of national state-owned companies and private-owned companies. There were nine state-owned companies and 158 private-owned companies of the national defense industry, which took part in the event. The increasing participation was result of the hard work, guidance and encouragement of the government through the Committee of the Defense Industry Policy (KKIP). It showed that the national defense industry has and is moving to be a host in their own country, especially in fulfilling the need of defense system equipment. However, there remains a main challenge to realize independence in the defense industry, that is the capacity of the human resources. Therefore, in the future, the human resources in defense with excellence and capability in technology must be prepared. Research in the defense equipment must be improved and is very important.

During the exhibition, the Ministry of Defense signed an agreement in defense industry cooperation with the Turkish government, showing the beginning of a collaboration in development of defense equipment products of the two countries in the future. Through the Indo Defence event, the already good relations, particularly in the defense sector, between Indonesia and friendly countries will continue and increase in the future.

INTERNATIONAL SEMINAR OF INDO DEFENSE 2014

Apart from products exhibition, an international seminar





SEMINAR INTERNASIONAL INDO DEFENCE 2014

Selain pameran produk, juga akan digelar seminar internasional bertema “*Exploring Defence Offset in Indonesia : Expectation, Partnership, and Strategies of Engagement*”. Melalui seminar ini diharapkan terjalin kerjasama antar industri pertahanan Indonesia dengan negara lain melalui kegiatan alih teknologi. Pada gilirannya, industri pertahanan mampu meningkatkan perekonomian melalui investasi.

Pada dasarnya, seminar ini dimaksudkan untuk sharing pengetahuan dan pengalaman di antara peserta terutama yang berkaitan dengan *offset* pertahanan. Di samping itu, melalui seminar ini diharapkan mendapatkan masukan terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2014 tentang mekanisme imbal dagang dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dari luar negeri terutama dalam hal mengatur *offset* dan lokal konten. Hasil seminar seperti ini akan menunjang kiat-kiat serta upaya kita dalam peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional menghadapi dinamika persaingan global.***

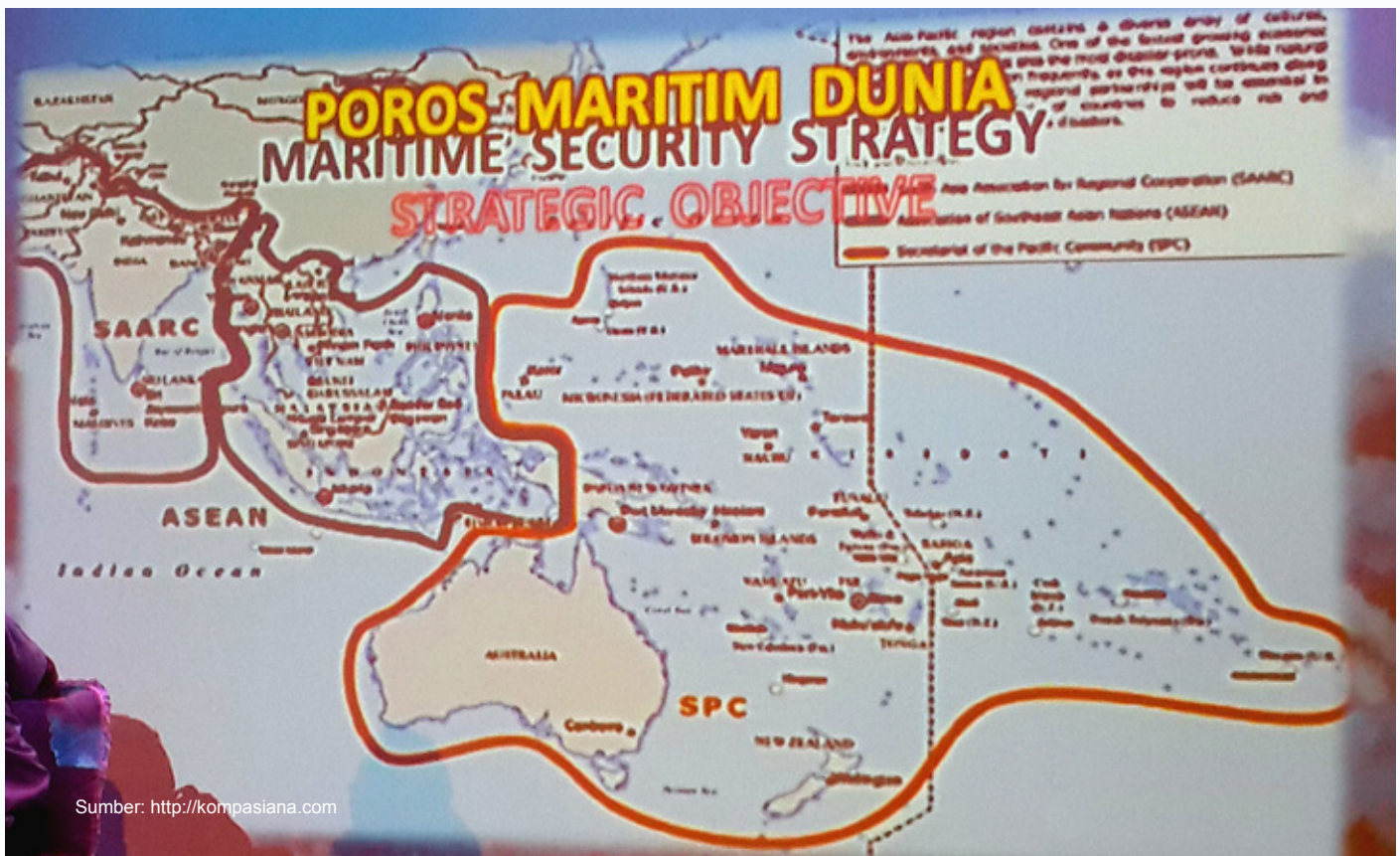
was also held, having the theme “Exploring Defense Offset in Indonesia: Expectation, Partnership, and Strategies of Engagement”. Through the seminar, it was expected that cooperation in defense industry between Indonesia and other countries would be set up through transfer of technology. In turn, the defense industry will be able to increase the economy through investment.

Basically, the seminar was aimed at sharing knowledge and experiences amongst the participants, especially those related to the defense offset. In addition, through the seminar, it was hoped that there would be inputs related to the implementation of the Government Regulation No. 67/2014 on the trade returns mechanism in the procurement of defense equipment from abroad, particularly in regulating the offset and local content. Result of the seminar will support tricks and efforts to increase independence in the national defense industry in facing the global competition dynamics.***

GAGASAN POROS MARITIM BAGUS, NAMUN BAGAIMANA DENGAN NASIB ‘URBAN PESISIR’ KITA?

MARITIME AXIS IDEA IS GOOD, YET HOW ABOUT OUR ‘MARITIME URBAN’?

By Prisca Delima, M.Sn., M.Si (han)
 Alumni of Peace and Conflict Resolution Program – Indonesian Defense University
 Head of Planning, Research and Community Service
 Postgraduate School of Urban Arts and Cultural Industries - IKJ



Sumber: <http://kompasiana.com>

LATAR BELAKANG

Gagasan Poros Maritim adalah salah satu sorotan dalam masa pemerintahan duet Joko Widodo-Jusuf Kalla lima tahun ke depan. Intinya, pembangunan Poros Maritim ditujukan untuk menonjolkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu entitas yang kuat dan dipandang tinggi yang secara geografis terletak di antara dua samudra. Hal ini memang tidak bisa dinafikan terkait realita geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia, bahkan juga turut memengaruhi dinamika wilayah antara samudra Hindia dan samudra Pasifik, antara benua Asia dan Australia.

Gagasan Poros Maritim yang sebenarnya termaktub

BACKGROUND

Maritime Axis is one of the highlights during presidential reign of duo Joko Widodo-Jusuf Kalla for the next five years. In essence, the development Maritime Axis is intended to move forward the existence of the Republic of Indonesia as a strong and highly regarded entity that geographically located between two oceans. The fact that cannot be denied based on geo-graphical, geo-strategic, and geo-economy reality of Indonesia. It is in fact also affecting the dynamics of the region between Indian and Pacific Oceans, between Asia and Australia.

Maritime Axis was actually an idea embodied in Wawasan Nusantara discourse. Nevertheless, it has been

dalam wacana Wawasan Nusantara, dianggap telah cukup lama diabaikan dan kurang diperhatikan sebagai potensi luar biasa Indonesia walau sebenarnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah cukup lama memiliki gagasan serupa terkait pembangunan jalur logistik Indonesia. Gagasan tersebutlah yang kemudian ditawarkan kembali serta diperkuat dengan keberadaan sekaligus berbagai program Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman beserta kementerian di bawahnya. Program yang diusung disebut-sebut antara lain adalah memperkuat budaya maritim, memposisikan nelayan sebagai salah satu pilar swasembada pangan, memperkuat keamanan maritim serta diplomasi maritim.

Meskipun gagasan Poros Maritim mendapatkan tepuk tangan persetujuan banyak pihak, tidak sedikit pula yang mempertanyakan strategi serta implementasi nyata program pembangunan ini. Khususnya terkait dengan 'budaya maritim', tidak sedikit yang mempertanyakan, "apakah Indonesia sungguh benar-benar memiliki budaya maritim?"

ADAKAH BUDAYA MARITIM?

Sejarah Nusantara sebagai cikal-bakal Negara Kesatuan Republik Indonesia memang dihiasi berbagai kisah kerajaan hebat seperti Sriwijaya dan Majapahit yang memiliki hubungan dagang dengan negara-negara di belahan dunia lain melalui laut. Sejarah kelam Nusantara pun mencatat kolonialisme yang datang lewat laut demi menguasai rempah-rempah yang merupakan komoditas unggulan pada masa tersebut. Hal mengesankan lain juga muncul melalui kisah lama para pelaut Bugis yang melanglang samudra hingga ke daratan Afrika, kenyataan

considered of being quite long neglected and being paid less attention as exceptional potentials of Indonesia. No matter what, Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas) has long had similar idea related to the construction of logistics line of Indonesia. However, the pretty much the same idea now has been re-offered and strengthened by the presence as well as various programs of Coordinating Ministry for Maritime Issues with the ministries underneath. Among other thing, the programs to be carried out will include: the strengthening of maritime culture, the positioning of fishing industry as one of the pillars of food security, the strengthening maritime security and maritime diplomacy.

Even though Maritime Axis idea has received big applause and approvals of many, a lot of people questioned its strategy and actual implementation of this development program. Specifically, in reference to 'maritime culture', came forward the question of "whether Indonesia really does have a maritime culture?"

IS THERE ANY MARITIME CULTURE?

History of Nusantara as the forerunner of the Republic of Indonesia indeed is decorated with fabulous epics of great kingdoms such as Srivijaya and Majapahit. Those kingdoms have formed trade relationship with many countries in other parts of the world by sea. The dark history of the archipelago also noted the colonialism era that also came from the sea. The colonialism came in order to dominate the spice trading, since spices had been portrayed as the leading commodity in that era. Another impressive thing also emerged through old folklores of Bugis sailors who have crossed vast ocean and had





yang selalu mengundang decak kagum mengingat peralatan dan kapal yang digunakan pada masa tersebut dianggap belumah secanggih yang ada di masa sekarang.

Kesadaran maritim pada era modern sepertinya lebih banyak didengungkan TNI AL dengan slogan *Jalesveva Jayamahe—Di Laut Kita Jaya*. Namun, di luar TNI AL, sejauh manakah kesadaran maritim dimiliki warga negara Indonesia? Hal tersebut tentulah perlu dan patut dipertanyakan terkait kesiapan pembangunan maritim itu sendiri. Di sisi lain, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.000+ pulau, berbagai kebijakan yang ada hingga saat ini pun lebih dianggap lebih pro darat, dan bukan kebijakan yang mengintegrasikan ekologi kelautan sebagai bagian tidak terpisahkan dari negara kepulauan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memang merupakan daerah unik yang memiliki keunggulan geografis tersendiri. Laut-laut Indonesia merupakan jalur perdagangan (SLOC) dan komunikasi (SLOC) internasional. Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang melintasi Indonesia pun merupakan jalur lalu lintas internasional yang terbuka. Lautan sekeliling NKRI selain merupakan alur laut kepulauan Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebenar-besarnya juga menyelipkan masalah dengan keberadaannya sejumlah daerah sumbat botol yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam Thailand, Kamboja dan Australia. Letak geografis yang sedemikian rupa, selain memiliki kerentanan tersendiri dalam segi keamanan terutama terkait ancaman yang berasal dari laut, juga memiliki keunggulan tersendiri terkait upaya pembangunan yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi tinggi.

reached African mainland - a reality that has always invited admiration given to the equipment and vessels used in that period had been considered as not as sophisticated as those that exists nowadays.

Maritime awareness in the modern era seems to be echoed by Indonesian Navy with its slogan: *Jalesveva Jayamahe – We Are Great on the Sea*. However, outside the Navy, the extent to which maritime awareness existed within the core of Indonesian citizens is questionable. This notion is certainly a necessity and can be related to the readiness of maritime development itself. On the other hand, as the largest archipelago in the world, with 17.000+ islands, various policies that exist today were more considered to be more pro-land, instead of policies that integrate maritime ecology as an integral part of the island nation.

Republic of Indonesia is a unique country that has its own geographical advantages. Indonesia seas have long been considered as Sea Line of Trades and Sea Lines of Communication (SLOC) recognized internationally. Indonesian archipelagic sea-lanes (ALKI) crossing Indonesia also stand as open international traffics. The seas around Indonesia, as archipelagic sea-lanes that can be used as much as possible yet hides some problems with the bottlenecks area that directly adjacent to Singapore, Malaysia, Brunei, Vietnam, Thailand, Cambodia and Australia. Such geographical location indeed have having its own vulnerability in terms of security, especially related to threats that come from the sea, yet it has its own advantages related to development that promise high economic growth.

Dengan nuansa yang sedemikian hebat itu, kembali pertanyaannya, sudah adakah saat ini budaya maritim yang mencerminkan budaya Indonesia beserta keanekaragaman dan dinamika wilayah?

PEMBANGUNAN POROS MARITIM DAN DESAIN PEMBANGUNAN URBAN MARITIM

Di sisi lain, ada pertanyaan yang juga muncul. Apakah 220+ juta penduduk Indonesia mampu bersama pemerintah mewujudkan gagasan Poros Maritim yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia? Mungkin klise apabila disebutkan bahwa sering kali kebijakan pembangunan kurang menyentuh pembangunan manusia berbasis sosial budaya, ataupun yang secara aktif dan optimal melibatkan seluruh masyarakat urban.

Pembangunan berbasis maritim pasti akan menumbuhkan daerah-daerah urban maritim baru dengan sekian banyak kota-kota pelabuhan yang tumbuh dan berkembang. Keberadaan daerah urban maritim baru pun akan berdampak pada interaksi penduduk setempat yang semakin kerap dengan mereka yang bukan berasal dari daerah lokalnya. Tentunya hal ini akan memicu interaksi budaya. Lalu, apakah dengan demikian budaya maritim akan terbentuk dengan sendirinya? Naif halnya apabila hal tersebut dianggap sebagai suatu keadaan yang pasti. Lebih mungkin, pembangunan yang ada akan menimbulkan sekat-sekat baru, kelompok-kelompok termarginalkan baru, dan friksi yang semakin kerap terjadi. Apalagi apabila ada ketidaksiapan penduduk lokal dalam menghadapi pembangunan masif lingkungan tempat tinggalnya. Alih-alih sejahtera, bisa jadi malah akan terjebak dalam lingkaran marjinal penuh penyakit masyarakat.

With such great nuances, let's go back to the original question - is Indonesian maritime culture there yet? Is there any maritime culture that reflects the culture of Indonesia and its multiculturalism and dynamics of the region?

MARITIME AXIS DEVELOPMENT AND DESIGN OF MARITIME URBAN DEVELOPMENT

On the other hand, one other question also arises. Are 220+ million people of Indonesia capable to work hand-in-hand with the government to realize the idea of Maritime Axis that aims to improve the welfare of the entire people of Indonesia? It might be cliché if we mentioned that often development policy was not really touching social and cultural human development, or actively and optimally involving the entire urban society.

Maritime-based development will certainly foster new urban areas parallels with the growth and development of many new ports maritime cities. The existence of new maritime urban area will have an impact on the interaction of people in which local population increasingly interact with those who are not from the local area. Obviously this condition will trigger more cultural interaction. The question is - will this kind of interaction form maritime culture by itself? Naive if we consider that condition as a definite state. More likely, the development will create new barriers, new marginalized groups, and increasingly frequent frictions. Moreover, the unpreparedness of local population facing massive development changes in their neighborhood might lead not to the welfare of people but a stuck loop situation of marginalized condition full of social problems.

Thus, one thing is sure, maritime culture cannot be constructed if humans as cultural actors do not get



Sumber: <https://ulunlampung.blogspot.com>



Sumber: sekarjepun.com

Dengan demikian, satu hal sudah pasti tidak mungkin pembangunan budaya maritim dapat dilakukan, apabila manusia sebagai pelaku budaya tidak mendapatkan perhatian secara holistik. Hal ini mengingat bahwa pembangunan berbasis manusia seturut ekologi dan dinamika lingkungannya terbukti dapat mengeliminasi berbagai friksi yang mungkin terjadi. Di sisi lain, masyarakat yang semakin tersentuh budaya yang berasal dari luar daerahnya dapat membentuk budaya multikultur yang kaya apabila konflik sejak awal dapat dikelola dengan baik. Dalam hal ini, pengelolaan manusia sebagai pelaku budaya merupakan hal yang sangat penting, sehingga dapat memaksimalkan pelibatan masyarakat, serta menjamin terjadinya keberlanjutan dalam proses pembangunan berbasis ekologi yang dapat berubah secara dinamis.

MASYARAKAT URBAN PESISIR SEBAGAI MODAL SOSIAL PEMBANGUNAN MARITIM

Sejumlah penelitian yang mengeksplorasi masyarakat pesisir menunjukkan perlunya pengelolaan sosial budaya terkait pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini *“bridging”* antara anggota masyarakat lokal, *“bonding”* antara masyarakat lokal dan pendatang serta *“linking”* masyarakat urban pesisir sebagai modal sosial dengan para pemangku kepentingan terbukti dapat meningkatkan sistem pengelolaan daerah serta meningkatkan kinerja. Membangun modal sosial seperti ini pun tidak dapat dibentuk dan diciptakan hanya dengan kebijakan publik belaka namun dengan menggali praktik-praktik serta pemahaman lokal mengenai *“socio-ecosystem”* darat dan laut yang secara berdampingan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat pesisir. Dalam hal ini, manajemen zona pesisir yang terintegrasi perlu dilakukan demi pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Sayangnya, belum terlihat penelitian-penelitian semacam itu di Indonesia, sehingga suatu model pembangunan budaya maritim ideal dapat diterapkan pada suatu lingkungan urban dengan kondisi tertentu.

Padahal, modal sosial semacam ini dapat menumbuhkan jaringan sosial yang kuat, menumbuhkan norma yang memediasikan kesempatan dan keluaran pembangunan, ataupun meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan yang terkoordinasi dan keuntungan kolektif berkat kerja sama antarindividu dan kelompok yang tentunya memfasilitasi kerja sama dan saling mendukungnya antar kelompok.

attention in a holistic manner. Especially, some examples around the world have provided models that human-based development that created in accordance to ecological and environmental dynamics has been proven able to eliminate frictions. On the other hand, people that are increasingly touched by culture originating from outside of their local area can form a rich multicultural basis if conflict being managed properly. In this case, people, as agent in cultural management is very important, both in maximizing the involvement of the community, and in ensuring the sustainability of the development process based on ecology that changed dynamically.

MARITIME URBAN SOCIETY FOR SOCIAL CAPITAL IN MARITIME DEVELOPMENT

A number of research exploring urban communities demonstrated the need for socio-cultural management related to sustainable development. In this case, *“bridging”* between members of the local community, *“bonding”* between local communities and newcomers, and *“linking”* maritime urban communities as social capital with other stakeholders has been proven able to improve local management system as well as to improve economic performance. It is being said that building social capital cannot only be formed and created with public policy alone, but by digging local practices and local understanding of *“socio-ecosystem”* of side by side sea and land in order to provide benefits to the maritime communities. In this case, the integrated coastal zone management needs to be done for sustainable coastal development. Unfortunately, these kinds of studies are very limited in Indonesia - therefore we have not yet had ideal development of maritime culture models that can be applied to urban environment with certain conditions.

It is really a shame since social capital can foster powerful social networks, foster norms that mediate the opportunity and development outcomes, as well as improve the efficiency of society by facilitating coordinated activities and collective advantages due to cooperation between individuals and groups that facilitating cooperation and mutual support groups.

END REMARKS

Social mapping research and feedback on maritime culture are really needed to generate understanding on cultural profile of the society, administration and



Sumber: okilukito.wordpress.com



Sumber: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>

PENUTUP

Riset pemetaan sosial serta umpan balik tentang budaya maritim sungguh diperlukan untuk menghasilkan pemahaman atas profil pelaku budaya, model administrasi dan operasional serta pemahaman atas perilaku masyarakat pesisir. Betapa sayangnya apabila sumber daya maritim Indonesia, baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada menjadi hancur karena salah kelola, atau pengelolaan yang sifatnya “coba-coba” tanpa logika dan perhitungan yang matang. Sepatutnya dalam hal ini kerja sama antar lembaga pemerintahan termasuk antar kementerian koordinator terkait dapat lebih ditingkatkan agar tidak terjadi ketumpangtindihan dalam program, kebijakan ataupun peningkatan masalah ego-sektoral.

Oleh sebab itu, dalam pembangunan maritim, perlu pelibatan semua pihak terkait, tidak hanya pemerintah belaka, namun juga masyarakat secara aktif, para akademisi dan pakar untuk mengukur dan menganalisis keluaran pembangunan yang ada, industri yang mendukung keterlibatan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan maritim yang menuju ke arah keberlanjutan. Perhatian khusus terhadap sosial budaya masyarakat urban maritim pun semoga dalam perjalanan bersama waktu dapat membentuk budaya maritim khas Indonesia, yang mungkin di suatu waktu akan menjadi tonggak pertahanan tersendiri bagi NKRI. Siapa tahu, dengan keberadaan budaya Indonesia, pancang-pancang perbatasan yang rentan bergeser ataupun digeser akan tergantikan dengan tonggak-tonggak hidup manusia Indonesia yang bangga akan negara, bangsa, dan budayanya.***

operational models, as well as an understanding of the behavior of the coastal communities in Indonesia. How unfortunate if Indonesian maritime resources, both natural resources and human resources might be destroyed due to mismanagement, or management of “by chance” that has neither logic nor exact calculation. It is only right that in this case, cooperation between various government institutions including between the coordinating ministries should be further improved in order to avoid overlapping policies, programs as well as ego-sectoral problems.

Therefore, it is necessary to involve all stakeholders in the maritime development, not just a mere government bodies, but also the society itself as active collaborator, together with academics and experts to measure and to analyze the output of existing development, industry that support community involvement, as well as the management of the maritime environment towards sustainability. Special attention to social culture of urban maritime might in time lead to form a unique Indonesian maritime culture – a culture that might present as the milestone in Indonesia’s defense. Who knows, with the presence of Indonesian culture, the vulnerable stakes marked the borders that easily being shifted or moved then will be replaced with the pillars of Indonesian society who are proud to their state, nation, and culture.***

PENGARUH GLOBALISASI DAN DINAMIKA KONDISI KEAMANAN KAWASAN ASEAN PADA SISTEM PERTAHANAN NKRI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN

GLOBALIZATION IMPACT AND THE DYNAMICS OF SECURITY CONDITION IN ASEAN REGION IN THE DEFENSE SYSTEM OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE DEFENSE ECONOMIC PERSPECTIVE

Oleh: Mayor Tek Novky Asmoro, S.T., M.Si (Han)

Pamen Kohanudnas, Alumni Prodi Ekonomi Pertahanan Cohort-3

Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan)

PENDAHULUAN

Indikator makro ekonomi PDB ASEAN cukup menegaskan bahwa stabilisasi ekonomi kawasan Asia Tenggara ini berada pada tren peningkatan yakni mencapai 3.084 triliun dollar AS atau 5.010 dollar AS secara merata. Sementara dari segi geopolitik tergambar nyata bahwa semakin dekatnya negara-negara ASEAN ke negara adidaya tunggal yakni Amerika Serikat serta tampilnya beberapa negara di jajaran atas sebagai negara dengan indeks daya saing global yang cukup kompetitif semakin menampilkan eksistensi strategis kawasan ini di dunia internasional (Darwanto, 2012).

Disamping beberapa tren positif di atas, ternyata untuk aspek keamanan justru masih berpotensi tampil sebagai isu yang paling menonjol tingkat kerawannya. Potensi-potensi perselisihan perbatasan antarnegara, tindak kejahatan transnasional (*transnational crime*) hingga konflik kawasan yang tak kunjung mereda semakin memunculkan kekhawatiran akan terjadinya pencideraan kedaulatan lingkungan strategis Asia Tenggara.

Situasi tidak menguntungkan ini secara langsung cukup bersentuhan dengan sistem pertahanan negara kita. Persoalannya, apakah berbagai dinamika tersebut mampu diantisipasi secara baik oleh pemerintah RI? Jawabannya, tentu belum. Begitu banyak kesepakatan, forum dialog internasional bahkan beberapa konferensi tingkat tinggi yang telah diselenggarakan namun terciptanya kondisi keamanan kawasan tak kunjung tercipta. Adanya tren positif dalam aspek ekonomi ternyata tidak berbanding lurus dengan stabilitas keamanan di kawasan. Perlu adanya analisis yang komprehensif guna memberi fundamental kerangka berfikir dalam rangka memecahkan berbagai persoalan kawasan ini.

DAMPAK GLOBALISASI DAN DINAMIKA KAWASAN

Era globalisasi semakin meningkatkan ketidakjelasan perbedaan antara masalah keamanan domestik dengan masalah transnasional. Terjadinya konflik internal yang berujung pada perang saudara di suatu negara tertentu maka secara otomatis berdampak pada gangguan terhadap negara tetangganya (kawasan) baik berupa gangguan pasokan sumber daya strategis, pandemi penyakit atau dampak-dampak ekonomi lainnya (Murdoch

INTRODUCTION

ASEAN's GDP as a macro economic indicator firmly states that the economic stabilization in the South East Asian region stays in an increasing trend, which reaches USD 3.084 trillion or USD 5.010 in average. From the geopolitical point of view, it can be seen that with the approaching ASEAN countries to the sole superpower country, the United States, and with the presence of countries with a competitive global competitiveness index, the region's strategic existence is more presented in the international forum (Darwanto, 2012).

Apart from the above positive trends, it appears that insecurity has the potential to be the most prominent issue in the security aspect. Incessant boarder conflicts, transnational crimes, to regional conflicts have resulted in concerns of any harming of the sovereignty of the strategic environment in South East Asia.

Such an unprofitable situation is directly related to the country's defense system. The problem is, can the dynamics be well anticipated by the Indonesian government? The answer is definitely "not yet". There are so many agreements, international dialogue forums, and even summits that have been held, however, the region's security condition has so far not been realized yet. The positive trend in the economic aspect appears to be not parallel with the security stability in the region. A comprehensive analysis is required to provide a fundamental thinking framework to solve various issues in the region.

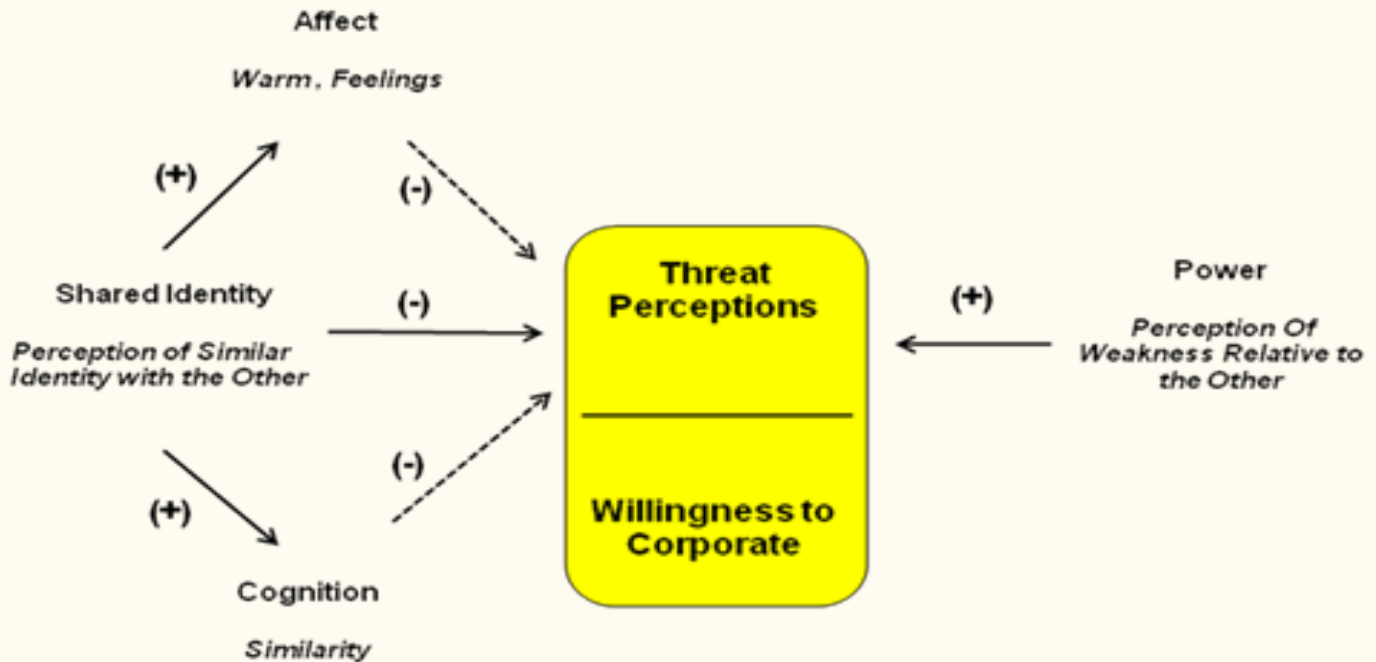
GLOBALIZATION IMPACT AND REGIONAL DYNAMICS

The globalization era makes it even more unclear in the difference between domestic security issues and transnational issues. Internal conflicts, which end up in civil wars in a certain country, automatically affect on the neighboring countries (region), both in the supply of strategic resources, sickness pandemic, as well as other economic impacts (Murdoch and Sandler, 2004). Meanwhile, the globalization results in a perception that a threat to a country's is also a threat to the region where the country is located. The most relevant example is the war against terrorists, limitation of nuclear proliferation, limitation of chemical and biological weapons, contribution

dan Sandler, 2004). Sementara itu, globalisasi berdampak pada adanya persepsi bahwa ancaman satu negara adalah ancaman sebuah kawasan dimana negara tersebut berada. Saat ini contoh yang paling relevan yaitu perang terhadap teroris, membatasi proliferasi nuklir, pembatasan penyebaran senjata kimia dan biologi, kontribusi untuk operasi penjaga perdamaian, dan mediasi-mediasi negara pihak ketiga terhadap konflik antar negara (Mc Guire, 2007).

to peace-keeping operations, and mediation by third-party countries toward interstate conflicts (Mc Guire, 2007).

The occurrence of frictions and conflicts cannot be separated from the emergence of a threat perception amongst entities with different points of view. Based on the above picture, the emergence of a conflict is not separated from two aspects, including relative power and shared identity. These two functions are the determining factor



Penjelasan Teori *Shared Identity* dalam membentuk Persepsi Ancaman

Sumber : Rousseau dan Garcia-Retamero (2007), *Identity, Power, and Threat Perception: A Cross-National Experimental Study*

Terjadinya perselisihan dan konflik tidak lepas dari munculnya persepsi ancaman diantara entitas yang berlainan sudut pandang. Berdasarkan penjelasan gambar di atas, timbulnya sebuah konflik tidak lepas dari adanya dua aspek yakni *relative power* (kekuasaan relatif) dan *shared identity* (identitas bersama) dimana kedua fungsi tersebut merupakan faktor penentu dari lahirnya sebuah persepsi ancaman (Rousseau dan Garcia-Retamero, 2007). Berdasarkan hal tersebut di atas kawasan dengan alkulturasi identitas politik, ekonomi dan sosial budaya yang erat akan berpotensi pada kultur perdamaian yang lebih kuat. Namun jika dihubungkan dengan fenomena globalisasi, kesamaan identitas negara di suatu kawasan justru memiliki kerawanan meluasnya sebuah konflik internal bila tidak diimbangi oleh eksistensi organisasi kawasan yang *acceptable* dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi.

POSITIONING STRATEGY INDONESIA DI ASEAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN

Sebagai negara “kunci” di kawasan Asia Tenggara, minimal ada tiga substansi terkait efektifitas strategi Indonesia dalam menempatkan posisi di kawasan dalam perspektif ekonomi pertahanan yaitu Komitmen NKRI, *Interrelationship* dan Kerjasama Pertahanan.

of the birth of a threat perception (Rousseau and Garcia-Retamero, 2007). Based on the above mentioned factor, a region with tight acculturation of political, economic and social cultural identity will have the potential in a stronger peace culture. However, related to the globalization phenomenon, the countries’ shared identity in a region will be prone of an enlarged internal conflict, if it is not balanced with the existence of the region’s organization, acceptable to solve the problems.

INDONESIA’S POSITIONING STRATEGY IN ASEAN IN THE DEFENSE ECONOMY PERSPECTIVE

As a ‘key’ country in the South East Asian region, there are at least three substances related to the effectiveness of Indonesia’s strategy in positioning in the region in the defense economy perspective, including commitment of the Unitary State of the Republic of Indonesia, interrelationship, and defense cooperation.

COMMITMENT TO THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

The Unitary State of the Republic of Indonesia in the ASEAN region, viewed from the defense economy perspective, must be positioned in the current ASEAN

KOMITMEN NKRI

Penempatan posisi NKRI di kawasan ASEAN, jika ditinjau dalam perspektif ekonomi pertahanan, haruslah menempatkan dinamika ekonomi dan keamanan ASEAN yang saat ini terjadi adalah sebuah keniscayaan dari era globalisasi. Semua itu secara umum harus terwujud dengan adanya perimbangan kekuatan (*balance of power*) di ASEAN dan khusus bagi Indonesia, hal ini akan direspon dalam bentuk penguatan sistem pertahanan negara bagi seluruh bangsa.

Ekonomi adalah salah satu sumber konflik dari keamanan kawasan jika dikaitkan dengan transformasi teknologi, penguasaan sumber daya ekonomi dan senantiasa menempatkan isu keamanan sebagai role model geopolitik sebuah negara. Meskipun beberapa indikator stabilitas lingkungan strategis Indonesia seperti yang tertera pada Data “*Stability Rating for Indonesia 2012*” belum pada tahap yang mapan namun secara umum, Indonesia telah dinilai sebagai aktor utama di kawasan.

Globalisasi yang terjadi di kawasan ASEAN cukup membuat stabilitas keamanannya berfluktuasi. Selain stabilitas militer dan keamanan, indikator lain yang merepresentasikan dinamika kawasan ini adalah stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kondisi stabilitas eksternal (Wijayanto, 2012). Melihat Data “*Stability Rating for South East Asia 2012*” dibawah negara dengan kekuatan ekonomi relatif kuat yakni Singapura cukup merata pada level yang tinggi terhadap seluruh aspek stabilitas lingkungan strategisnya. Sedangkan, Indonesia, Malaysia dan Thailand relatif stabil di kondisi eksternalnya. Untuk stabilitas ekonomi, negara-negara seperti Laos, Kamboja serta Myanmar masih pada level terendah hingga saat ini.

Dampak globalisasi kawasan juga memicu beberapa potensi konflik dan *status quo* dengan nuansa latar belakang motif ekonomi yang kuat seperti masalah pelanggaran wilayah perbatasan, klaim teritorial serta kejahatan transnasional seperti *sea piracy*, *human trafficking*, *illegal fishing* dan sebagainya. Menyikapi situasi seperti ini, Indonesia sebagai negara berpengaruh di kawasan, secara terpadu dengan seluruh negara Asia tenggara lainnya perlu mendorong pemberdayaan organisasi ASEAN. Hal ini sejalan dengan komitmen NKRI untuk mewujudkan sustainability perdamaian dunia serta mendukung sistem pertahanan negara dengan mengembangkan kerjasama ASEAN sebagai forum mediasi internasional demi eksistensi perdamaian kawasan.

INTERRELATIONSHIP

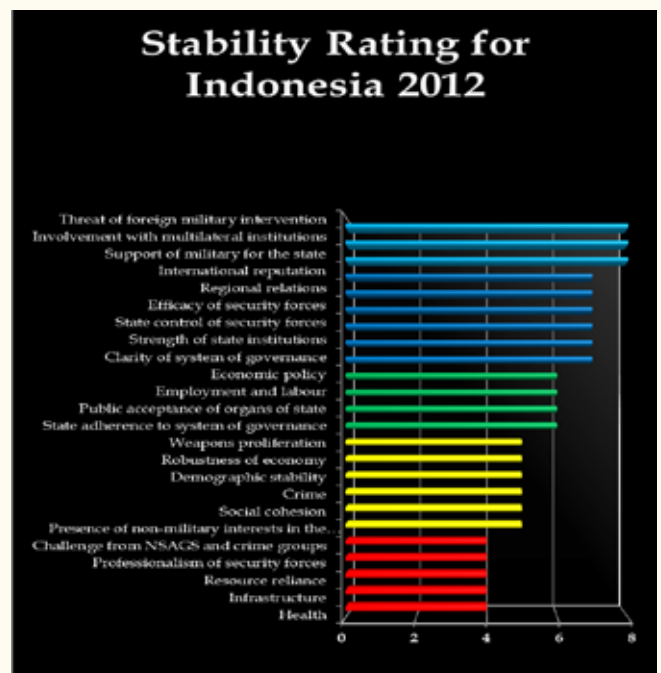
Dalam konteks membangun perdamaian kawasan dengan sistem pertahanan negara, merupakan strategi yang memberi peluang diantara semua unsur pemangku kepentingan negara guna selalu berkoordinasi secara harmonis dan bersifat *interrelationship*. Hal ini merupakan poin penting dalam menganalisis relevansi antara beberapa variabel teori *shared identity* dengan realitas yang terjadi di kawasan Asia Tenggara sehingga selaras dengan komitmen NKRI untuk menciptakan perdamaian kawasan yang mendukung sistem pertahanan negara secara komprehensif.

economic and security, which is a necessity in the globalization era. In general, it must all be realized by the balance of power in ASEAN, and particularly for Indonesia, it will be responded in the form of strengthening the state’s defense system for the whole nation.

Economy is one of the conflict sources in the region’s security if related with technology transformation, mastering of the economic resources, and security issues as a geopolitical role model of a nation. Despite some stability indicators in Indonesia’s environmental stability as mentioned in data in “*Stability Rating for Indonesia 2012*”, in general, Indonesia is considered the main actor in the region.

Globalization in the ASEAN region has caused fluctuation in the security stability. In addition to military and security stability, other indicators represent the region’s dynamics, which are political, economic, social and the external stability (Wijayanto, 2012). Seeing the data in “*Stability Rating for South East Asia 2012*”, under a country with relatively strong economic strength such as Singapore, the stability aspect of the strategic environment at a high level is fairly even. Indonesia, Malaysia and Thailand have a relative stable external condition. In terms of economic stability, countries such as Laos, Cambodia, and Myanmar are positioned in the lowest level to date.

The region’s globalization impact has also triggered some conflicts and status quo with a strong economic motive as the background, such as violation in the border areas, territorial claims and transnational crimes, such as sea piracy, human trafficking, illegal fishing, and so on. Facing such a situation, Indonesia, as an influential nation in the region, needs to encourage empowerment of ASEAN organization in an integrated way with all South East Asian countries. This is in line with the commitment of the Unitary State of the Republic of Indonesia to realize sustainability of the world peace and to support the National



SUMBER : Widjajanto (2012), Ancaman dalam Kajian Pertahanan

Bahwasannya realitas kawasan ASEAN saat ini, ada hal kontradiksi yang muncul. Beberapa negara terikat dalam faktor geografi dan kultur budaya yang relatif homogen (bahkan serumpun) ternyata belum cukup menumbuhkan kultur perdamaian sehingga kawasan ini tidak pernah reda dari perselisihan. Meskipun secara umum pertentangan yang terjadi tidak sampai muncul hingga konflik terbuka tetapi potensi itu tetaplah harus diwaspadai. Selain budaya, ternyata faktor ekonomi muncul sebagai bentuk ancaman yang paling dominan disamping ancaman militer dan budaya (MacKuen, Erikson, dan Stimson 1992).

KERJASAMA PERTAHANAN

Posisi ASEAN saat ini dinilai sangat strategis sebagai daerah penyangga utama untuk raw materials bagi sektor industri dan manufaktur negara-negara industri maju seperti China, Jepang dan Korea. Pertumbuhan sektor ekonomi ASEAN cukup menjanjikan bagi beberapa negara yang memiliki ekonomi kuat seperti AS, Jepang dan China. Semenjak diberlakukannya kebijakan “no tariff” lewat *Asean Free Trade Agreement (AFTA)* di tahun 1992 kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan perdagangan bebas dengan China (*ACFTA*) indikasi volume ekspor perdagangan China dengan negara-negara ASEAN yang melonjak hingga 660 % dalam kurun waktu 2002 yang masih US\$ 54,767 ke nilai US\$ 362,85 di tahun 2011 (www.britama.com, 2012).

Kerjasama pertahanan yang bersifat *interrelationship*, tentu berbeda dengan sifat *interrelationship* ke dalam yang memiliki sasaran langsung untuk pemilikan komitmen NKRI. Sementara *interrelationship* dalam arti kerjasama kawasan harus berguna untuk menunjang kerjasama pertahanan, terutama menghadapi dinamika geopolitik dan geostrategi Asia Tenggara yang diarahkan pada kemandirian sistem politik luar negeri RI yakni sistem politik bebas aktif. Artinya, dengan kerjasama pertahanan yang bersifat *interrelationship* haruslah berimplikasi positif kepada kemandirian sistem politik luar negeri RI yang bebas dan aktif.

Beberapa permasalahan diantaranya sengketa Blok Ambalat antara Indonesia Malaysia, ketegangan di kawasan Laut China Selatan, konflik klaim pulau Spratley di yang diperebutkan beberapa negara ASEAN, pertikaian bersenjata di perbatasan Kamboja-Thailand serta beberapa kejahatan perompakan di selat Malaka yang kerap menimbulkan ketegangan di antara negara-negara sekitarnya menuntut peran ASEAN untuk lebih aktif. Setiap kebijakan yang diambil tetap perlu menjunjung tinggi supremasi sistem pertahanan negara masing-masing karena organisasi ini memang bukan dibentuk dalam format aliansi pertahanan.

defense system by setting up ASEAN cooperation as an international mediation forum for the existence of the regional peace.

INTERRELATIONSHIP

The context of building the regional peace with the National defense system, is a strategy to give an opportunity amongst all stakeholders to always coordinate harmoniously and in an interrelated way. This is an important point in analyzing the relevance between some variables of shared identity and reality that take place in the South East Asian region, so that it is consistent with the commitment of the Unitary State of the Republic of Indonesia to create the regional peace that supports the National defense system comprehensively.

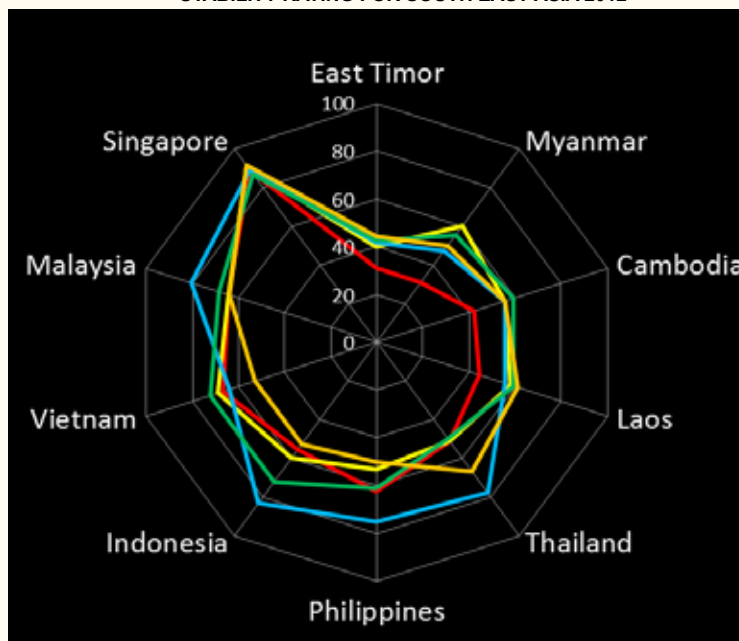
In reality, in the current ASEAN region, there are contradictions. Some countries are tied in geographical and cultural factors, which are relatively homogeneous. However, these countries cannot yet give birth to peace culture causing incessant conflicts in the region. Although in general, the disagreements do not cause open conflicts, the potentials must be watched out. In addition to culture, an economic factor has emerged as the most dominant threat apart from military and cultural threats (MacKuen, Erikson, and Stimson 1992).

DEFENSE COOPERATION

The current ASEAN position is considered very strategic as the main buffer zone for raw materials for the industrial and manufacture sectors of developed industrial countries, such as

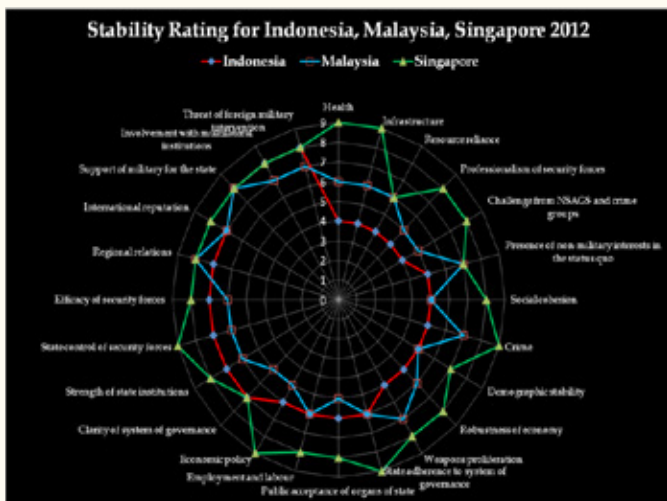
China, Japan and Korea. ASEAN's growth in the economic sector is fairly promising for countries with strong economy, such as the United States, Japan and China. Since the “zero tariff” policy through the ASEAN Free Trade Area in 1992, followed by the free trade agreement with China (*ACFTA*), China's volume of trade exports with ASEAN countries has surged 660% in 2002, from US\$ 54.767 to US\$ 362.85 in 2011 (www.britama.com, 2012).

STABILITY RATING FOR SOUTH EAST ASIA 2012



Sumber : Widjajanto (2012), Ancaman dalam Kajian Pertahanan

Interrelationship defense cooperation is certainly different with *interrelationship*, which has a direct target for commitment ownership of the Unitary State of the Republic of Indonesia. *Interrelationship* in the regional cooperation must be useful to support



Sumber : Widjanto (2012), Ancaman dalam Kajian Pertahanan

Pengejawantahan peran ini terkait sistem politik bebas aktif yang dianut RI mengandung konsekuensi yakni bebas menentukan kemandirian ideologi, bebas memilih negara-negara sebagai relasi bilateral, bebas tidak memihak salah satu blok/alianse serta aktif di percaturan politik dunia atas dasar prinsip kemerdekaan dan perdamaian. Politik bebas aktif adalah upaya bangsa Indonesia dalam menentukan sikap di dunia internasional atas dasar *Independence of thinking dan freedom of action* (Kuntoro-Jakti, 2012).

Akhirnya, wacana strategi kerjasama pertahanan sebagai bagian dari strategi kebijakan politik luar negeri RI, sepatutnya dikelola secara lintas sektoral, atau *interrelationship* diantara para pemangku kepentingan dengan sasaran yakni kemandirian sistem pertahanan negara dalam mengelola segenap potensi komponen pertahanan dan sasaran akhir atau *outcome*, yaitu stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Beberapa hal penting yang dapat disimpulkan berdasarkan penjabaran di atas bahwasannya kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah strategis dalam sistem pertahanan NKRI sehingga RI harus mengambil posisi secara aktif dalam memberdayakan organisasi ASEAN namun demikian harus tetap berlandaskan sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif sesuai dengan komitmen NKRI. Untuk memberdayakan forum ASEAN secara *interrelationship* maka setiap anggotanya harus berkomitmen pada seluruh hasil mediasi sebagai langkah solusi dari organisasi ini untuk mengatasi beberapa konflik ini demi terciptanya perdamaian di kawasan. Disamping itu diperlukan komitmen kuat dengan prinsip menghargai kedaulatan setiap negara serta mendukung kerjasama pertahanan dengan mengedepankan hubungan saling menghormati sistem pertahanan masing-masing negara.

Sebagai usul terkait posisi Indonesia dalam menyikapi dinamika keamanan kawasan ASEAN adalah dengan strategi mengaplikasikan kebijakan politik bebas aktif dalam forum organisasi ASEAN. Berkaitan hal tersebut, strategi akan mengangkat tiga program aksi penting yaitu penanaman komitmen NKRI, *interrelationship*, dan kerjasama pertahanan adalah poin penting guna penguatan strategi pertahanan dan strategi politik bebas aktif.***

defense cooperation, especially to face geopolitical and geostrategic dynamics in South East Asia, directed to strengthen the foreign political system of the Republic of Indonesia, which is free and active political system. It means that interrelationship defense cooperation must have a positive implication to the strengthening of the free and active foreign political policy of the Republic of Indonesia.

Some issues include conflict in Ambalat Block between Indonesia and Malaysia, tension in the South China Sea, conflict of Spratley island claim contested by some ASEAN countries, armed conflict in Cambodia – Thailand border area, and some piracies in Malacca strait, which often results in tensions between surrounding countries. These require ASEAN to play a more active role. Every policy taken must still uphold supremacy of the National defense system as the organization was not set up in a defense alliance format.

The embodiment of this role is closely related to the free and active political system to which Indonesia adheres. It contains consequences, which include being free to determine independence of ideology, free to choose countries as bilateral relations, free to be impartially, and active in the world's politics based on the independence and peace principles. The free and active politics are the Indonesian effort in determining the attitude in the international forum based on independence of thinking and freedom of action (Kuntoro-Jakti, 2012).

Finally, the defense cooperation strategy discourse as a part of Indonesia's foreign policy must be managed in an interrelated way amongst the stakeholders, with the aim of strengthening the National defense system in the management of the whole defense components and final outcome, that is security stability in the South East Asian region.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Some important points to be concluded based on the above description is that South East Asia is a strategic region in the defense system of the Unitary State of the Republic of Indonesia, so that Indonesia must take an active position in empowering ASEAN organization. However, it must still be based on the free and active foreign political system, according to the commitment of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To empower ASEAN forum as interrelationship, each member must be committed to the whole mediation result as a solution step of the organization to solve some conflicts for the creation of peace in the region. In addition, a strong commitment is required with the principle of respecting sovereignty of each country and supporting defense cooperation by mutually respecting the defense system of each country.

As a recommendation related to Indonesia's position in addressing the security dynamics in the ASEAN region, the free and active political policy must be applied in the ASEAN organization forum. In relation with that, such strategy will support three important programs, including commitment of the Unitary State of the Republic of Indonesia, interrelationship, and defense cooperation. These three programs are important points to strengthen the defense and free and active political strategy.***

CADANGAN ENERGI UNTUK PERTAHANAN NEGARA

ENERGY RESERVE FOR NATIONAL DEFENSE

Oleh: Mayor Cba Sahrin Dharmawanto
Pamen Denma Mabasad

A. LATAR BELAKANG

ANCAMAN DAN GANGGUAN

Wilayah kedaulatan Indonesia seluas 5.193.250 km² yang terbentang dari Sabang sampai Merauke merupakan modal utama pembangunan. Mempertahankannya dari ancaman dan gangguan wajib dilakukan dengan memberdayakan seluruh komponen bangsa melalui sistem pertahanan negara yang terintegrasi. Ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan NKRI sangat komprehensif, baik dalam lingkup global, regional, nasional. Jika faktor ancaman dapat diantisipasi sejak dini, maka akan lebih mudah membangun kekuatan untuk mengatasinya. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dari luar maupun dalam negeri, yang mengancam atau membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Jenisnya ada dua, yaitu ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Penanganannya dilakukan melalui Operasi Militer Perang (OMP-ancaman militer) dan Operasi militer selain Perang (OMSP-ancaman nir militer).

Penanganan ancaman yang sistematis dan terintegrasi diatur dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. UU tersebut menyatakan ada tiga komponen bangsa yang disiapkan menghadapi ancaman yaitu Komponen Utama (Komput), Komponen Pendukung (Komduk), dan Komponen Cadangan (Komcad). Komput adalah TNI, sedangkan Komcad dan Komduk adalah sumber daya nasional yang disiapkan untuk memperbesar kekuatan dan kemampuan Komput. Pemanfaatan sumber daya nasional disini salah satunya adalah penggunaan SDA seperti minyak sebagai sumber energi untuk mobilisasi bagi peralatan dan personel TNI dan minyak merupakan sumber energi utama yang mendominasi seluruh peralatan TNI, sehingga ketersediaannya wajib dijaga.

B. KETERSEDIAAN MINYAK INDONESIA

Indonesia bukanlah negara kaya minyak, karena cadangan minyaknya hanya 0,4% cadangan dunia, yang menurun setiap tahunnya. Cadangan minyak Indonesia saat ini ±4 miliar barel yang diperkirakan hanya untuk 11 tahun, sedangkan gas dan batubara masing-masing selama 32 dan 85 tahun (Tabel1). Produksi minyak yang lebih kecil dibandingkan konsumsi memaksa Pemerintah melakukan kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan

A. BACKGROUND

THREATS AND DISTURBANCE

Indonesia's sovereignty with a total coverage area of 5,193,250 km², stretching from Sabang to Merauke, is the prime capital of development. Defending it from any threats and disturbance is an obligation, by empowering the nation's all components through an integrated National defense system. The threats and disturbance towards the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia are quite comprehensive, nationally, regionally, as well as globally. If the threats can be anticipated early, it will be easier to build strength to overcome them. A threat is every effort and activity from both domestic as well as foreign countries, which threatens or endangers the sovereignty, integrity, and safety of a nation. There are two kinds of threat, military and non-military. These must be overcome through OMP (for military threats) and OMSP (for non-military threats).

A systematic and integrated handling of the threats is regulated in Law No. 3/2002 on National defense. The law stipulates that there are three components of the nation, which are prepared to face threats, including Main Component (Komput), Supporting Component (Komduk), and Reserve Component (Komcad). The Main Component is the Indonesian Armed Forces, while the Supporting Component and the Reserve Component are national resources, prepared to enlarge strength and capability of the Main Component. One of the national resources is the natural resources, such as oil as energy reserve, which is taken advantage to mobilize equipment and personnel of the Indonesian Armed Forces. Oil is also the main energy resource, which dominates all equipment of the Indonesian Armed Forces, so that the availability is obliged to be maintained.

B. AVAILABILITY OF INDONESIA'S OIL

Indonesia is not an oil-rich country, as its oil reserve makes only 0.4% of the world's reserve, and it decreases every year. Indonesia's proven oil reserve at present is ±4 billion barrels, predicted to last only for 11 years. On the other hand, the gas and coal reserve may last for respectively 32 years and 85 years (Table 1). The oil production, which is smaller than the consumption, forces the government to implement import policy to fulfill the domestic needs.

dalam negeri.

C. CADANGAN PENYANGGA ENERGI (STRATEGIC PETROLOEUM RESERVE)

Strategic Petroleum Reserve (SPR) adalah konsep penyimpanan cadangan migas melalui *stockpiling* untuk digunakan pada masa tertentu yang bersifat darurat. Jenis SPR: bensin, solar, LPG, avtur, minyak bumi. AS adalah negara pertama yang menerapkan SPR akibat krisis minyak karena embargo negara-negara Arab sebagai protes atas dukungan AS kepada Israel dalam perang Yomkippur. SPR AS terbesar di dunia dengan kapasitas ±727 juta *barrel* dan terletak di teluk Meksiko (biaya pembangunan ±10-20 miliar USD (1970). SPR AS dapat mengatasi krisis minyak selama 6 bulan, dan telah digunakan beberapa kali untuk tugas pertahanan (OMP maupun OMSP)¹.

Urgensi SPR bertujuan menjaga keseimbangan antara

C. STRATEGIC PETROLEUM RESERVE

Strategic Petroleum Reserve (SPR) is a concept of saving oil and gas reserve through stockpiling for emergency use at certain times. SPR consists of gasoline, diesel fuel, LPG, avtur, and petroleum. The United States is the first country that applies SPR as a result of the oil crisis, due to the embargo by Arab countries as a protest following the US support to Israel in Yomkippur war. The country's SPR is the largest in the world, with a capacity of ± 727 million barrels, located in the Mexico Bay. The construction cost was ± 10 - 20 billion US Dollars (1970). The US SPR can overcome an oil crisis for 6 months, and has been used several times in defense duties (both OMP and OMSP)¹.

SPR is aimed at maintaining balance between reserve and demand, stabilizing oil price, and maintaining the availability of oil and gas in certain conditions (war,

Tabel 1. Potensi sumber daya energi fosil Indonesia

Sumber Energi Fosil	Cadangan (Cad)	Produksi/thn (Prod)	Rasio (Cad/Prod/SD) (%)
Minyak	4 miliar barel	347 juta barel	11 tahun
Gas	104,71 TSCF	3212 BSCF	32 tahun
Batubara	21 miliar ton	329 juta ton	85 tahun
CBM	453 TSCF	-	-
Shale Gas	574 TSCF	-	-

Sumber : Kementerian ESDM 2013.

cadangan dan permintaan, menstabilkan harga minyak, serta menjaga ketersediaan migas pada kondisi tertentu (perang, bencana alam, sanksi internasional)². Menurut *International Energy Agency* (IEA), SPR harus dapat menjamin ketersediaan energi minimal selama 30 hari dari ketergantungan impor. Indonesia melalui Pertamina hanya mampu menjamin ketersediaan BBM selama 21 hari, sedangkan gas 16 hari. Namun ketersediaan ini diperuntukan bagi kegiatan perekonomian nasional, bukan untuk pertahanan.

D. PENERAPAN CADANGAN ENERGI DALAM TUGAS PERTAHANAN NEGARA (ANALISA DAN HASIL KAJIAN PENULIS)

Kondisi minyak nasional yang semakin memprihatinkan serta keberadaan regulasi sebagai dasar merupakan peluang pembentukan SPR (khususnya bagi pertahanan). Realisasinya dapat dilihat dari dua hal, yaitu pemenuhan

natural disaster, international sanction)². According to the *International Energy Agency* (IEA), SPR must be able to guarantee the energy availability for at least 30 days from import dependence. Indonesia, through Pertamina, can only guarantee oil availability for 21 days, and gas availability for 16 days. However, the availability is used for economic activities, instead of defense purpose.

D. APPLICATION OF ENERGY RESERVE IN NATIONAL DEFENSE DUTIES (ANALYSIS AND STUDY RESULT OF THE WRITER)³

The increasing concerning national oil condition and the existing regulation as a basis are opportunities to set up SPR (particularly for defense purpose). The realization can be seen in two factors, fulfillment based on *Rentinkon* and revamping the internal system of the Indonesian Armed Forces to accelerate the establishment of energy reserve.

1. A. B. Beaubouef (2007). The Strategic Petroleum Reserve. "US Energy and Security Oil Politics 1975-2005. United States of America: Texas A & M University Press, College Station.
 2. Erfu Guo, Meiting Ju, Na Gong (2011). Development of Chinese Strategic Petroleum Reserves base on comparable research about Japanese situation and policies, Energy Procedia, 52262-2270
 3. Sahrin Dharawanto (2014). Strategic Petroleum Reserve (SPR) in the Indonesian Armed Forces Environment as a Form of Logistics Support in the National Defense Duties. Thesis at the School of Defense and Strategy Study, Energy Security Study Program, Indonesian Defense University

yang didasari Rencana Tindakan menghadapi Kontinjensi (Rentinkon) dan pembenahan sistem internal TNI untuk mempercepat pembentukan cadangan energi.

KETIDAKSEIMBANGAN PRODUKSI DAN KONSUMSI MINYAK INDONESIA

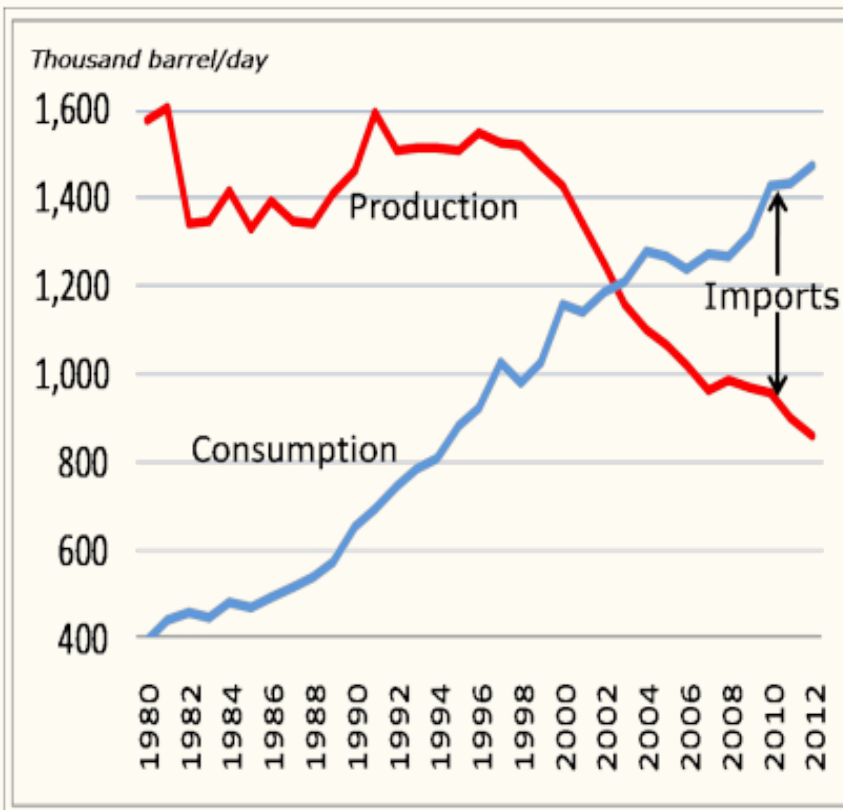
Kondisi minyak nasional yang semakin kritis terlihat dari ketidakseimbangan produksi dan konsumsi hingga menimbulkan impor. Kemampuan produksi minyak (2014) yang hanya ± 813 ribu bph (menurun dari > 1,5 juta bph pada 1990an), jauh lebih rendah dibandingkan konsumsinya (2012) yang mencapai 1,4 juta bph (Gambar 1). Defisit minyak sebesar 600 ribu bph memaksa pemerintah menerapkan impor untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Jika minyak habis, maka Indonesia akan bergantung sepenuhnya dari impor. Kondisi ini mengancam ketersediaan energi, sehingga konsep SPR wajib dimulai saat ini juga. Penerapan SPR dapat diawali di sektor pertahanan mengingat pertahanan merupakan sektor utama penjaga kedaulatan. Keberhasilan pembentukan SPR pertahanan dapat dijadikan pemicu pembentukan SPR nasional.

IMBALANCE BETWEEN PRODUCTION AND CONSUMPTION OF INDONESIA'S OIL

The increasingly critical condition of the national oil can be seen from the imbalance between production and consumption to the requirement of import. The capacity of oil production in 2014, reaching only ± 813 thousand bph (decreased from > 1.5 million bph in 1990s), is far lower compared to its consumption in 2012, reaching 1.4 million bph (see Picture 1). The oil deficit of 600 thousand bph forces the government to import crude oil to fulfill domestic need. In case of being depleted, Indonesia will completely depend on import. Such a condition threatens the energy availability, so that the SPR concept is obliged to begin right now. The application of SPR can begin in the defense sector as it is the main sector to maintain sovereignty. The success of SPR in defense can trigger the establishment of national SPR.

The application of energy reserve is also in accordance with the Presidential Regulation Number 5/2006 on the Policy of National Energy. Under the regulation, the current oil consumption of 50% of the national energy consumption, is targeted to reach only 20% in 2025. Such

Indonesia: oil production & consumption



Oil production: A mixture of hydrocarbons that exists in liquid phase in natural underground reservoirs and remains liquid at atmospheric pressure after passing through surface separating facilities.

Oil consumption: inland demand plus aviation and marine bunkers and refinery fuel and loss. Consumption of fuel ethanol and biodiesel is also included.

Source: United States Energy Information Administration, for oil production; and BP Statistical Review of World Energy, for oil consumption

Gambar 1. Produksi dan konsumsi minyak Indonesia hingga menimbulkan impor



Sumber: <https://eksplorasi.co>

Penerapan cadangan energi juga sesuai dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, dimana konsumsi minyak yang saat ini mencapai 50% konsumsi energi nasional, ditargetkan hanya menjadi 20% pada 2025. Efisiensi konsumsi yang diterapkan pada Perpres tersebut memungkinkan dilakukannya pengalihan sebagian minyak yang dikonsumsi untuk disimpan sebagai cadangan.

DASAR REGULASI (SEBENARNYA) SUDAH ADA!

Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memuat konsep umum SPR, yaitu UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Di sektor pertahanan, konsep umum SPR juga telah dimuat dalam regulasi internal TNI berupa ST Kasad Nomor 625/1984, tentang Pembentukan Cadangan Bekal Umum. ST tersebut mengatur pembentukan cadangan BMP bagi Satpur dan Satbanpur. Cadangan BMP adalah cadangan pusat yang didesentralisasikan pada seluruh Kotama TNI-AD, cadangan BMP ini dikenal dengan Iron Stock, yang disimpan pada setiap Kotama. Namun jumlah Iron Stock sangat terbatas, dan tidak pernah bertambah sejak kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 1984.

Ketiga regulasi tersebut dapat menjadi dasar bagi TNI untuk mewujudkan cadangan energi bagi pertahanan. Cadangan yang berupa BBM diperoleh dari sumber kekayaan alam (SKA) yang merupakan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara dan bertanggung jawab mendukung tugas pertahanan negara.

TEKNIS PEMENUHAN SPR

Pemenuhan besarnya cadangan energi (khususnya

efficiency applied in the Presidential Regulation will allow a part of the consumed oil to be saved as reserve.

REGULATION BASIS (ACTUALLY) ALREADY EXISTS!

Indonesia actually already has a regulation that contains a general concept of SPR, that is Law Number 30/2007 on Energy and the Government Regulation Number 36/2004 on Oil and Gas Downstream Business Activities. In the defense sector, the general concept of SPR is also contained in the internal regulation of the Indonesian Armed Forces in the form of ST. of the Army Chief of Staff Number 625/1984, on the Establishment of General Reserve. The ST regulates the establishment of BMP reserve for Satpur and Satbanpur. BMP reserve is central reserve, which is decentralized in all Kotama of the Indonesian Army. Such reserve is known as Iron Stock, which is stored in every Kotama (Main Command). However, the amount of Iron Stock is very limited and has never augmented since the policy was launched in 1984.

These three regulations can be a basis for the Indonesian Armed Forces to realize energy reserve for defense. Oil reserve can be obtained from natural resources, which is a component of the National defense (Reserve Component and Supporting Component) and responsible in supporting the duties of the National defense.

TECHNICAL FULFILLMENT OF SPR

The fulfillment of energy reserve (particularly oil) for the Indonesian Armed Forces can be implemented gradually. Determination of the amount of oil need allocated for reserve can be based on Rentikon of every unit of the Armed Forces. The calculation can be based on the procedure of forces deployment (protap 1/3 homebase, 2/3 mobilization) to forward priority scale and efficiency⁴.



minyak) bagi TNI dapat dilakukan secara bertahap. Penentuan jumlah kebutuhan minyak yang dialokasikan sebagai cadangan dapat didasarkan pada Rentinkon setiap satuan TNI. Perhitungan tersebut dapat didasarkan pada prosedur pengerahan pasukan (protap 1/3 *homebase*, 2/3 *mobilization*) untuk mengedepankan skala prioritas dan efisiensi⁴.

PEMBENAHAN SISTEM INTERNAL TNI

Dua hal yang menurut penulis perlu segera dibenahi dalam lingkungan internal TNI adalah Hutang BBM TNI dan evaluasi kebijakan harga BBM bagi TNI.

a. Menurunkan hutang TNI

Hutang TNI untuk BBM sangat besar, yaitu Rp. 7,7 Triliun (2013). Timbulnya hutang terutama disebabkan pengenaan harga keekonomian (non subsidi) yang kecenderungannya semakin meningkat (misalnya untuk HSD pada 15 Desember 2013 adalah Rp 11.125,- dan pada 15 Januari 2014 menjadi Rp 11.650,-). Akibat keterbatasan anggaran, pemenuhan kebutuhan BBM menyebabkan timbulnya hutang. Seiring dengan meningkatnya harga dan jumlah kebutuhan, maka hutang juga semakin meningkat. Mengatasi hal ini, efisiensi pemakaian BBM di lingkungan TNI wajib dilakukan. Peninjauan kembali terhadap pengenaan harga keekonomian juga harus dilakukan secepatnya. Jika hutang berkurang (lunas), maka anggaran dapat dialihkan bagi penyediaan cadangan energi/BBM.

REVAMPING OF THE INTERNAL SYSTEM OF THE INDONESIAN ARMED FORCES

According to the writer, two things that need to be immediately revamped in the internal environment of the Indonesian Armed Forces include fuel debts of the Indonesian Armed Forces and evaluation of the fuel price policy for the Indonesian Armed Forces.

a. Reducing the Indonesian Armed Forces debts

The Indonesian Armed Forces have a huge amount of fuel debts, totaling IDR 7.7 trillion (2013). The debts were mainly caused by the imposition of economical price (non subsidy), which tends to continuously increase (for example, HSD on December 15th, 2013 was IDR 11,125 and on January 15th, 2014 was IDR 11,650). Due to the limited budget, the fulfillment of fuel need has resulted in debts. In line with the increasing price and needs, the debts have also been increasing. To overcome this, efficient use of fuel in the Indonesian Armed Forces environment is mandatory. Review on the imposition of the economical price must also be immediately executed. If the debts decrease (are settled), the budget can be transferred into provision of energy/fuel reserve.

b. Evaluation of the fuel price policy for the Indonesian Armed Forces through the removal of Vehicle Fuel Tax (PBB-KB)

The Vehicle Fuel Tax (PBB-KB) is a tax imposed on

4. Energy Information Administration (EIA) (2013). www.eia.gov dan BP Statistical Review of World Energy 2013. British Petroleum (2013, June). <http://www.bp.com/statisticalreview>

b. Evaluasi kebijakan harga BBM bagi TNI melalui penghapusan PBB-KB

PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), merupakan pajak yang dikenakan bagi kendaraan pengangkut bahan bakar. Sesuai pasal 1 dan 2 Perpres No.36 Tahun 2011 (tentang Perubahan atas Tarif PBB-KB), besarnya PBB-KB adalah 5% dan hanya diterapkan untuk BBM bersubsidi. Namun pada kenyataannya, BBM TNI yang dibeli dengan harga non-subsidi tetap dikenakan pajak oleh Pemda setempat. Selain itu, besaran PBB-KB tidak sama di setiap daerah yaitu antara 5-10%.

Pemberlakuan harga keekonomian yang disertai beban pajak (yang seharusnya tidak ada) semakin menambah pembengkakan (pemborosan) anggaran bagi penyediaan BBM TNI. Besarnya pemborosan dapat mencapai Rp 385 M (dihitung dari hutang BBM TNI 2013 sebesar Rp 7,7 T, dengan PBB-KB hanya 5 %). Jumlah tersebut, jika dikonversi menjadi BBM, setara dengan 33.047 ton solar (Rp11.650,00/L), atau 35.321 ton premium (Rp10.900,00/L), atau 33.391 ton avtur (Rp11.548,00/L). Jumlah yang sangat besar! yang seharusnya dapat digunakan bagi penyediaan cadangan energi untuk TNI. Penerapan PBB-KB jelas tidak sesuai dengan regulasi resmi yang berlaku. Selain itu, TNI bukanlah institusi yang *profit oriented*, sehingga tidak pantas jika minyak yang digunakan untuk tugas negara masih dikenakan pajak.

E. KESIMPULAN

Penyediaan cadangan energi (SPR) bagi pertahanan perlu segera dilakukan, terlebih kondisi minyak Indonesia yang semakin kritis. Energi (minyak) merupakan SDA yang termasuk dalam Komcad dan Komduk. UU No. 3/2002 (tentang Hanneg) mengatur peran dan tanggung jawab Komcad dan Komduk untuk mendukung TNI selaku Komput, oleh karenanya pembentukan SPR bagi TNI perlu segera direalisasikan. Terlebih keberadaan UU Nomor 30 Tahun 2007 dan PP Nomor 36 Tahun 2004 serta ST Kasad Nomor 625/1984 yang semakin menguatkan dasar pembentukan cadangan energi bagi pertahanan. Pembentukan SPR merupakan antisipasi untuk mengatasi ancaman militer dan nirmiliter yang dapat terjadi kapan saja. Sebagai langkah implementasi, pembenahan sistem internal TNI wajib dilakukan secepatnya melalui evaluasi kebijakan harga BBM bagi TNI. Pemborosan anggaran akibat pemberlakuan PBB-KB juga perlu dibenahi secepatnya disertai pengawasan lapangan untuk menindak tegas pelanggaran yang masih terjadi.

Dampak ketiadaan energi mungkin belum terasa saat ini, karena pemenuhan BBM TNI oleh Pertamina selalu diprioritaskan (walaupun kekurangannya dibukukan ke dalam hutang yang semakin bertambah). Namun jika minyak Indonesia habis, maka kemampuan negara dalam penyediaan minyak semakin terbatas. Pemenuhan minyak seluruhnya akan diperoleh dari impor yang harganya cenderung naik, sesuai tren harga minyak dunia yang otomatis, hal ini berimbas kepada TNI. Pembentukan SPR bagi TNI perlu segera diterapkan sebelum terjadi kelangkaan minyak, sehingga TNI selaku Komponen Utama dapat menjalankan tugasnya secara profesional untuk tetap menjaga kedaulatan NKRI.***

fuel transporting vehicles. According to Articles 1 and 2 of the Presidential Regulation No. 36/2011 (on Amendment of Vehicle Fuel Tax Tariff), the Vehicle Fuel Tax is 5% and only applied for subsidized fuel. However, in fact, fuel for the Indonesian Armed Forces, which is purchased on non-subsidized price, remains taxed by the local Regional Government. In addition, the Vehicle Fuel Tax differs from one to another region of between 5 – 10%.

The imposition of economical price plus tax (which in fact should not be present), adds to the budget inefficiency in fuel provision for the Indonesian Armed Forces. The inefficiency reaches IDR 385 billion (calculated from the fuel debts of the Indonesian Armed Forces in 2013 amounting to IDR 7.7 trillion, with Vehicle Fuel Tax of only 5%). The amount, converted into fuel, is equivalent to 33.047 tonnes of diesel fuel (IDR 11.650/L) or 35.321 tonnes of premium (IDR 10.900/L) or 33.391 tonnes of avtur (IDR 11.548/L). It is such a huge amount, which is supposed to be able to be used for energy reserve for the Indonesian Armed Forces. The application of the Vehicle Fuel Tax is clearly not in accordance with the prevailing official regulation. In addition, the Indonesian Armed Forces are not a profit-oriented institution, so that it is not proper if fuel for state duties remains taxed.

E. CONCLUSION

Energy reserve (SPR) for defense must be immediately provided, let alone with the increasingly critical condition of the Indonesian oil. Energy (oil) is natural resources, which is included in Reserve Component and Supporting Component. Law Number 3/2002 on National defense regulates the roles and responsibilities of Reserve Component and Supporting Component to support the Indonesian Armed Forces as the Main Component. The establishment of SPR for the Indonesian Armed Forces must therefore be realized immediately. Moreover, the existence of Law Number 30/2007 and the Government Regulation Number 625/1984 increasingly strengthens the basis of energy reserve establishment for defense. The establishment of SPR is an anticipation to overcome both military as well as non-military threats that may occur anytime. As an implementation, revamping the internal system of the Indonesian Armed Forces must be executed as soon as possible through the evaluation of fuel price policy for the Indonesian Armed Forces. Budget inefficiency due to the imposition of Vehicle Fuel Tax must also be revamped as soon as possible, accompanied with a field supervision to give a firm sanction to any violation that still occurs.

The impact of the absence of energy may not be felt now, as the fulfillment of fuel for the Indonesian Armed Forces remains Pertamina's priority (although the deficit is recorded in increasing debts). However, when Indonesia's oil is depleted, the state ability to provide oil will be increasingly limited. Oil fulfillment will completely depend on import, of which the price tends to increase according to the world oil price. This will automatically affect the Indonesian Armed Forces. SPR for the Indonesian Armed Forces must be immediately established before an oil scarcity. This way, the Indonesian Armed Forces as the Main Component will be able to execute their duties professionally in guarding the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia.***



Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu memberikan pengarahan pada apel Danrem-Dandim di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.



Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu memberikan pengarahan pada Perwira TNI segarnisun III di Surabaya.



Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menerima laporan sebelum memberikan pengarahan pada Perwira TNI di Madiun.



Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu memberikan pengarahan kepada Prajurit Penjaga Perbatasan Pulau Rondo.



Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu memberikan pengarahan pada Perwira TNI Se-Bali.



Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menandatangani Sampul Program Peringatan Hari Bela Negara, Penyerahan Buku Pedoman Umum Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Penandatanganan MoU Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa oleh empat Kementerian di Monas, Jakarta Pusat.



Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menerima Penghargaan Brevet Hiu Kencana dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio.



Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menjadi Pembicara Kunci pada Mukernas LVRI 2014 di Surabaya.



Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dikukuhkan sebagai warga kehormatan Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan.



Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meninjau first cutting PKR105/Fregate No. 2 di PT Pal Indonesia.



Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea.



Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan Duta Besar Australia.



Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan.



Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan pamitan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia.



Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemhan Ibu drg. Nora Ryamizard Ryacudu, MARS melakukan kegiatan Bhakti Sosial dalam rangka peringatan Hari Ibu 2014 di Perumahan Pondok Rajeg, Depok.



Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Mengucapkan

Selamat Hari Natal 25 Desember 2014
dan

Tahun Baru 1 Januari 2015





MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

WIRA